

# PEREMPUAN BERGERAK

bersatu bersama lawan tirani



## PEREMPUAN DAN PLURALISME

**Perempuan Indonesia di Bawah  
Ancaman Ekstrimisme Agama**

**Merdeka Beragama dan Beribadah?**

**Makna Pluralisme Bagi  
Perempuan**



## Perempuan Bergerak

Edisi III  
Juli - September  
2012

### rembug perempuan

3 Perempuan dan Pluralisme

### fokus utama

4 Perempuan Indonesia di Bawah ancaman Ekstrimisme Agama

### perspektif

6 Merdeka Beragama dan Beribadah?

### warta perempuan

11 Makna Pluralisme Bagi Perempuan

### warta komunitas

14 #BedalsMe: Gerakan Merayakan Keberagaman

### opini

16 Tafsir Agama dan Budaya Sumber Diskriminasi Terhadap Perempuan

### sosok

19 Irshad Manji: Mimpi Buruk Osama bin Laden

### bedah film

22 Pura Langgar: Tempat Inspiratif Bertoleransi

### bedah buku

24 "Ngesuhi Deso Sak Kukuban": Merekatkan Persaudaraan dan Kemanusiaan

### puisi

27 Kutub Yang Menangis  
Dewi Misteri

### pojok kata

28 Pluralisme  
28 Pluralitas  
28 Multikulturalisme  
28 Liberalisme  
28 Primodialisme

## Perempuan Bergerak

Penanggung Jawab: Rena Herdiyani

Pemimpin Redaksi: Hegel Terome

Redaktur Pelaksana: Joko Sulistyio

Redaksi: Naning Ratningsih, Listyowati, Nani Ekawaty, Rakhmayuni, Ika Agustina

Desain visual: Joko Sulistyio

Distribusi : Joko Sulistyio

*Perempuan Bergerak* merupakan media yang memuat pandangan-pandangan yang membangun kesadaran kritis kaum perempuan di seluruh Indonesia sehingga memberdayakan dan menguatkan mereka. Kekuatan bersama kaum perempuan yang terbangunkan itu merupakan sendi-sendi penting terdorongnya gerakan perempuan dan sosial umumnya untuk menuju masyarakat yang demokratis, setara, tidak diskriminatif dan tidak subordinatif.

Redaksi menerima kritik, saran dan sumbangan berupa surat pembaca, artikel dan foto jurnalistik. Naskah, artikel dan foto jurnalistik yang diterima redaksi adalah yang tidak anti demokrasi, anti kerakyatan, diskriminatif dan bias gender. Naskah tulis diketik pada kertas A4, spasi satu, huruf Arial 12, maksimal 3 halaman dalam bentuk file atau print-out.

Alamat Redaksi dan Iklan: Jl. SMA 14 No. 17 RT/RW 009/09, Cawang, Jakarta Timur 13630. Telp: 021-8004712; Fax: 021-8004713; Email : ykm@indo.net.id; Website : www.kalyanamitra.or.id

Untuk berlangganan *Perempuan Bergerak* secara rutin, kirimkan nama dan alamat lengkap ke redaksi.

Redaksi menerima sumbangan pengganti biaya cetak Rp. 10.000,- dan biaya pengiriman di rekening sesuai kota tujuan. Transfer ke Rekening Bank Bukopin Kantor Kas Plaza Kalibata, No. Rekening 4206200202 a/n. Yayasan Kalyanamitra.

# Perempuan dan Pluralisme

**N**egara menjamin tiap warga negaranya untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 1 yang berbunyi: “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Demikian juga dengan ayat 2 yang memberi kebebasan terhadap tiap warga Negara Indonesia untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nuraninya. Dan pada ayat 3, negara juga menjamin kebebasan warga negaranya untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Meskipun UUD 1945 telah menjamin kebebasan tiap orang, ironisnya kebebasan itu sulit diperoleh. Kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut kepercayaan serta kebebasan berekspresi dan berserikat menjadi hal yang mahal harganya di Indonesia. Perbedaan yang ada telah melahirkan penindasan baru mayoritas atas minoritas. Apa yang terjadi pada pembubaran diskusi Irsad Manji di Jakarta maupun di Jogjakarta, beberapa waktu yang lalu, menjadi contoh nyata tidak adanya penghormatan atas perbedaan yang ada.

Demikian pula penyerangan terhadap komunitas Ahmadiyah dan kelompok Syiah yang merupakan bagian dari penolakan sekelompok orang terhadap keberagaman. Pada situasi itu, perempuan mengalami kekerasan dan diskriminasi tidak saja berbasiskan keyakinan beragama tetapi juga karena identitas mereka sebagai perempuan. Penolakan terhadap pluralisme memperkuat kekerasan dan diskriminasi berbasiskan gender. Akibatnya, perempuan menanggung lebih banyak pelanggaran hak dibandingkan laki-laki.

Padahal negara ini terbentuk dari keberagaman suku, bahasa, agama, budaya dan adat. Seharusnya keberagaman yang ada itu dijadikan kekayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu, di mana posisi perempuan dalam kehidupan yang beragam ini? Apakah pluralisme hanya terkait dengan persoalan agama? Buletin Perempuan Bergerak edisi kali ini mencoba menyajikan isu perempuan dan pluralisme. Semoga apa yang kami sajikan dalam edisi ini memberikan pengetahuan bagi kita semua untuk melahirkan perubahan yang lebih baik.

Jakarta, 17 Agustus 2012

Joko Sulistyono  
Redaktur Pelaksana





# Perempuan Indonesia di Bawah Ancaman Ekstrimisme Agama

**B**aru saja kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-67 tahun. Bersamaan dengan itu, kita juga merayakan Hari Raya Idul Fitri 1433 H. Dua momentum yang menarik untuk kita renungkan di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara.

Indonesia yang sudah memasuki usia 67 tahun itu mungkin belum 100 persen mencerminkan kebebasan dan kemerdekaan warganya. Bisa jadi, Indonesia baru 67 persen memenuhi harapan warganya, karena masih banyak persoalan bangsa dan negara yang belum dituntaskan jawabannya. Transisi kekuasaan dari satu rejim ke rejim lainnya sejak Indonesia merdeka tahun 1945, tidaklah berjalan mulus. Kekuasaan Soekarno yang dimulai sejak 1945 berujung di kudeta tahun 1965 oleh Soeharto. Orde Lama digantikan dengan Orde Baru. Suatu tatanan dunia baru yang ditopang kuat oleh sistem kapitalisme global. Tatanan lama Indonesia yang berbasiskan Nasionalisme, Agama, dan Komunisme ala Soekarno dihancurkan.

Sejak Orde Baru berkuasa, Indonesia dibingkai oleh politik "SARA" ala Soeharto. Soeharto memelihara sentiment-sentimen primordial suku, agama, ras, warga Indonesia, yang dengan mudahnya dipakai untuk membenturkan satu kelompok warga dengan kelompok warga lainnya. Dengan kekuatan militer dan operasi inteligennya, Soeharto dengan mudah menghentikan tiap kekuatan baru yang dianggapnya menentangnya dengan memberi mereka cap SARA. Begitu pun sebaliknya, dengan gampang pula Soeharto menyuburkan sentiment itu melalui konflik-konflik sosial, yang kerap disimpulkan dari sisi SARA.

Tentu konflik-konflik sosial yang berbasis SARA itu bukanlah percikan-percikan api yang muncul begitu saja. Hampir sebagian besar hasil operasi inteligens Soeharto, misalnya mendorong ekstrem kanan, demikian dia menyebutnya, sebagai kelompok Islam radikal untuk melawan ekstrem kiri (sebutan untuk kelompok sosialis dan komunis). Tak hanya itu, Islam pun dikendalikan pihak ABRI, untuk kepentingan-kepentingan politik militernya. Kecurigaan-kecurigaan kepada kaum minoritas (etnis dan agama) tetap dipertahankan sedemikian rupa hingga setiap saat terbuka celah untuk mengkambing hitamkan kaum minoritas sebagai pelaku sekaligus korban konflik sosial yang berkembang. Itulah ironisnya kekuasaan Orde Baru!

Bergulirnya Reformasi, sebagai transisi rejim, politik SARA tidak dapat dikendalikan oleh rejim penguasa, karena sisa-sisa Orde Baru masih memegang kekuasaan di dalam kekuasaan ini. Amandemen UUD 1945 sampai empat kali telah mengubah tatanan kenegaraan Indonesia, yang diikuti dengan perubahan susunan di dalam kelembagaan negara. Bahkan perubahan di dalam batang tubuh UUD 1945 dengan pasal-pasal dan ayat-ayat yang penuh dengan kepentingan politik kelompok tertentu, bagai revolusi merangkak yang menjebol tatanan berbangsa dan bernegara yang seutuhnya. Polisi berpisah dari kesatuan angkatan bersenjata, berada langsung di bawah kekuasaan Presiden. Sedangkan 3 kesatuan angkatan lainnya, masih berkomandan di Panglima TNI dan berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan. Semua institusi ini tak sepenuhnya bisa dikendalikan sang Presiden. Belum lagi Badan Inteligens Nasional yang tak patuh, sehingga tak terukur kerja-kerjanya.

Selanjutnya, kita juga melihat begitu banyaknya konflik-konflik berbasis etnis dan agama merebak di seantero Indonesia pasca Reformasi, bahkan urusan Pilkada saja bisa dimanipulasi dengan sentiment-sentimen SARA. Ekstremitas kelompok-kelompok tertentu seakan dipelihara oleh negara reformasi dan dipertontonkan setiap hari melalui media massa cetak dan elektronik. Kekerasan atas nama agama seakan dibenarkan, sementara aparat polisi dan TNI diam seribu bahasa sekalipun korban berjatuh di mana-mana. Tak ada kepastian hukum, karena hukum dan kebenaran seakan milik sekelompok orang. Negara absen memberi perlindungan hukum dan keamanan bagi individu dan kelompok minoritas, bahkan membenarkan tindakan biadab sekelompok orang atas nama agama dan etnis tertentu.

Perubahan UUD 1945 dan lembaga-lembaga yang menyertainya secara samar-samar telah terjadi kudeta kekuasaan oleh anasir-anasir Islam yang menginginkan terbentuknya pemerintahan dan negara Islam di Indonesia. Kudeta merangkak ini didukung pula oleh kekuatan ekonomi global dan terorisme global. Indonesia menjadi ladang subur ekstrimisme agama. Ratusan Perda dihasilkan di berbagai daerah di Indonesia untuk mengatur moral seseorang, termasuk Perda Syariah yang mengatur kehidupan perempuan Indonesia. Di Pusat sendiri berhasil dibuat UU Porno-

grafi, yang isinya juga mengatur moral seseorang dan perempuan kebanyakan. Tentu saja semua itu sangat bertentangan dengan hak-hak fundamental dan asasi perempuan yang diakui sama di depan UUD 1945 dan berbagai instrumen hukum internasional. Namun ekstrimisme itu telah berkawin dengan patriarki penguasa, dan logika modal yang menghalalkan segala cara.

Pasca 1965, wajah Indonesia makin semrawut dan khaotis. Orde Baru dan Orde Reformasi telah membawa Indonesia ke jurang kehancurannya. Kehancuran ekosistem lingkungan, sosial ekonomi, sosial budaya, politik, dan hankam rata. Pancasila sebagai ideology negara, sistem nilai kenegaraan dan kebangsaan, sistem hidup bersama, nilai-nilai luhur, lenyap dalam sekejap. Korupsi merajalela, kolusi membiak, nepotisme meluas merasuk sendi-sendi kehidupan kita.

Coba kita simak dalam-dalam apa yang disurat para pendiri bangsa dan negara di *preamble* UUD 1945, sejernih-jernihnya:

*"Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan Ini kemerdekaannya*

*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan*

*untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".*

Apabila kita membandingkan pernyataan yang ada di *preamble* UUD 1945 dengan realitas kehidupan kita saat ini, maka jauhlah api dari panggung. Demikian pula eksistensi perempuan Indonesia di tengah kekuasaan Orde Reformasi yang alfa menegakkan dan melindungi hak-hak asasi perempuan. Negara sudah gagal melindungi segenap warganya ketika hak-hak minoritas dirampas. Negara sudah gagal ketika warganya hidup miskin dan melarat, bodoh dan terkebelakang. Apalagi hal itu banyak dialami kaum perempuan kita. Oleh karena itu, Indonesia, seperti kata Bung Soekarno, harus kembali ke 3 pilarnya, yakni Nasionalisme, Agama, dan Komunisme. Semoga!\*\*\*\*\* (HG)



# Merdeka Beragama dan Beribadah?

Oleh: Ruby Kholifah\*)

*"Kaula nika reng budhu, tak oneng pa napa, po taona romah kula eobbarra..."*  
(Saya ini orang bodoh, nggak tahu apa-apa, tahu-tahu rumah saya dibakar...).

Rohiyah (50thn). Kini tinggal di pengungsian. Sejak rumahnya dibakar pada tanggal 26 Agustus 2012, bersama lebih 250 warga desa Karang Gayam kini terpaksa dievakuasi ke GOR Sampang. Catatan lapangan staf AMAN Indonesia melaporkan ada 48 rumah yang dibakar pada tragedi penyerangan 26 Agustus 2012 lalu. Anak kedua Rohiyah, Wami (22 Th), sempat dirawat di rumah sakit karena wajahnya terluka parah terkena lemparan batu. Gigi depan Wami patah 2 dan bibirnya pecah. Bagian dagu bawah juga mengalami luka jahitan. Saat ini, bersama 9 orang anaknya, bu Rohiyah tinggal di pengungsian. Sembari cerita, dia sibuk mengusap punggung anak terakhirnya, Al-Farisi (3 Thn) yang sedang demam dan rewel. Tampak Rodipah (9 Thn), anaknya yang ke-7, menempelkan kepalanya di tungkai ibunya. (Catatan lapangan Imroatus, 30 Agustus 2012)

Kekerasan masa yang terjadi di Sampang Madura, merupakan eskalasi ketegangan antara kelompok syiah dengan kelompok mayoritas muslim di Sampang. Kekerasan serupa juga terjadi pada 29 Desember 2011, yang akhirnya membawa Tajul Muluk, pimpinan Syiah di Sampang, ke penjara dengan dakwaan penodaan agama. Kekerasan serupa juga menimpa kelompok minoritas Ahmadiyah dan pengikut Kristen karena pelarangan pendirian rumah ibadah. Laporan Wahid Institute (WI) 2011 tentang kondisi kebebasan beragama di Indonesia melaporkan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak minoritas beragama semakin meningkat, dari 64 kasus pada tahun 2010, menjadi 93 kasus. Dari total kasus yang muncul, ada sekitar 55 kasus (60%) yang bersinggungan dengan agama Islam dan sejumlah 25 kasus (27%) terkait dengan agama Kristen dan sisanya 12 kasus (13%) dengan agama dan kepercayaan lainnya. Ada lima bentuk pelanggaran yang terungkap oleh tim reporter WI diantaranya adalah: pembatasan atau pelarangan ibadah, ancaman kekerasan, pembiaran kekerasan, pemaksaan keyakinan dan kriminalisasi keyakinan. Apakah masih ada kemerdekaan di negeri ini? Apa lantas makna merdeka jika untuk memilih keyakinan dan mengekspresikan keyakinan saja, harus dibatasi dengan kerangka "boleh" dan "tidak boleh" dari per-

spektif mayoritas? Apakah negara berhak menentukan batas-batas kemerdekaan beragama dan berkeyakinan? Bagaimana masyarakat merespon kemerdekaan beragama dan beribadat di Indonesia?



## Menakar Kembali Makna "Merdeka" dan "Beragama"

Kemerdekaan beragama dan beribadat sesuai dengan keyakinan masih menjadi wacana yang menakutkan bagi banyak orang. Ini karena kemerdekaan beragama mengindikasikan dua hal yaitu merdeka memilih dan merdeka dari tekanan siapapun karena pilihan tersebut. Merdeka memilih artinya seseorang berhak untuk menentukan agama dan kepercayaan apa yang sesuai dengan dirinya tanpa ada paksaan orang lain. Sementara pemaknaan merdeka dari tekanan orang lain secara sederhana bisa dijelaskan bahwa pilihan agama atau kepercayaan tertentu seharusnya tidak mengancam ketenteraman dan keselamatan seseorang. Termasuk ketika pilihan keyakinan tersebut diekspresikan ke dalam tata cara peribadatan yang diyakini sesuai dengan pilihan keyakinan seseorang.

Dalam kamus Bahasa Indonesia kata merdeka mengandung tiga makna. Pertama, merdeka artinya bebas (dari penghambaan, penjajahan) atau berdiri sendiri. Kedua, merdeka artinya tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Ketiga, merdeka berarti tidak terikat, tidak tergantung kepada orang atau pihak tertentu, atau leluasa. Ini agak kontras jika kita melihat definisi beragama menurut kamus bahasa Indonesia yang memberikan tiga definisi yaitu (1) menganut (memeluk) agama, (2) beribadat; taat kepada agama, baik hidupnya menurut agama, (3) sangat memuja-muja, mementingkan, gemar sekali kepada.

Jika kita melihat definisi secara sekilas dari kata merdeka dan beragama, tentu kita akan berpikir bahwa kedua kata tersebut saling kontradiktif. Merdeka sangat memuja pada ketidakterikatan, sementara beragama

mensyaratkan sebuah keterikatan atau kepatuhan pada doktrin-doktrin agama. Lantas, mungkinkah dua kata merdeka dan beragama digabungkan? Saya rasa kuncinya ada pada pemilihan definisi yang tepat untuk membuat kedua kata tersebut bermakna positif. Ini karena merdeka mempunyai makna positif untuk penegakan kedaulatan diri dan beragama juga mempunyai makna positif yang mengacu pada hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dan alam. Sehingga memadukan kedua kata tersebut haruslah menghasilkan sebuah makna positif.

Jika kita menggunakan definisi ketiga dari kata merdeka yaitu tidak terikat atau tidak tergantung kepada orang atau pihak tertentu. Kemudian dipadukan dengan definisi beragama yang kedua yaitu baik hidupnya menurut agama, artinya bahwa ukuran yang dipakai adalah kebaikan. Kebaikan di sini adalah nilai universal yang di tradisi agama manapun ukurannya sama, karena kebaikan menggunakan takaran hati nurani. Sehingga dengan demikian makna kebaikan itu sendiri tidak tergantung dari apapun atau pihak manapun. Dengan kata lain, makna kebaikan bebas dari kepentingan politik apapun. Dengan demikian kebaikan itu merdeka eksistensinya.

Nah, sekarang kita mendapatkan sebuah definisi bebas tentang merdeka beragama sebagai sebuah kondisi tidak tergantung kepada orang atau pihak tertentu untuk berbuat kebaikan pada kehidupan manusia menurut agama.

### **Merdeka Beragama: Konstitusi V.S Realitas**

Teks dan realitas tidak jarang berbanding terbalik. Ini karena teks memiliki keterbatasan ruang dan waktu, sementara realitas mempunyai dinamika sosial yang tinggi melampaui teks. Sehingga untuk memahami teks diperlukan sebuah cara pandang yang bernama kontekstualitas, artinya membaca teks dengan cara mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik pada saat teks dilahirkan, serta membawa teks dengan cara melihat konteks kekinian. UUD 1945, telah mengalami amandemen sebanyak empat kali, ini artinya bahwa konstitusi Negara Indonesia telah mengalami kontekstualisasi sebanyak empat kali, sehingga saat ini konstitusi negara Indonesia lengkap mengatur perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM). Terutama perlindungan hak-hak sipil warga negara yang termaktubkan ke dalam pasal 28 A-J. Termasuk bicara tentang kemerdekaan beragama dan beribadah, seperti yang dituliskan di dalam pasal 28 E sebagai berikut:

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih

kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Sebagai sumber dari segala produk hukum di Indonesia, UUD 1945 seharusnya diinterpretasikan sesuai dengan semangat pembukaannya yang terdiri dari empat hal yaitu tidak ada penjajahan dalam bentuk apapun dan kepada siapapun, kemerdekaan bangsa Indonesia mensyaratkan bersatu, berdaulat, adil dan makmur untuk semua, kehidupan kebangsaan yang bebas, dan negara wajib melindungi segenap rakyat dan tanah air Indonesia. Pasal 28E adalah wujud komitmen negara akan melindungi kebebasan beragama dan beribadat di Indonesia. Ini yang harus dijadikan rujukan untuk membuat aturan-aturan yang lebih teknis untuk perlindungan kemerdekaan warga negara untuk memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agama masing-masing.

Selain UUD 1945, masih ada aturan-aturan hukum internasional yang menjadi pedoman dalam implementasi perlindungan hak-hak sipil yaitu *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) yang diratifikasi pada tanggal 30 September dan pada 28 Oktober tahun yang sama, Indonesia meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Keduanya diadopsi ke dalam UU No. 11/2005 dan UU NO. 12/2005. Sebagai wujud dari komitmen kita pada Deklarasi HAM, maka UU No. 39 tahun 1999 dibuat. Implementasi UUD 1945, ICESCR dan ICCPR harus dibarengi dengan political will yang tegas untuk menyelaraskan semua produk UU yang berada di bawah UUD 1945 agar senafas dengan prinsip-prinsip yang dibawa oleh ketiga sumber hukum tersebut. Sehingga, sudah selayaknya jenis produk hukum apapun yang bertentangan dengan semangat dan prinsip-prinsip ketiga sumber hukum di atas harus dicabut.

Tapi kenyataannya, banyak produk hukum yang diskriminatif masih dipakai, dipertahankan dan dijadikan rujukan oleh berbagai pihak. Misalnya saja UU No. 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penodaan dan penistaan agama, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006/Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat dan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri dalam Negeri masing-masing No.03 Tahun 2008, No. KEP-033/A/



JA/6/2008 dan No.199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan/atau Pengurus JAI dan Warga Masyarakat.

Dalam kasus pelanggaran hak-hak warga untuk beribadah misalnya, aturan-aturan tersebut bahkan dipakai untuk legitimasi pihak-pihak tertentu untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok agama minoritas seperti Ahmadiyah, Syiah, Kristen dan aliran-aliran agama yang dianggap sesat. Peraturan Bersama Menteri Nomor: 9 Tahun 2006/Nomor: 8 Tahun 2006 sering menjadi legitimasi kelompok intoleran untuk melakukan intimidasi dan penutupan gereja dengan alasan tidak memenuhi salah satu syarat administratif, yaitu dukungan masyarakat sekitar. Dalam hal ini, rumah ibadah suatu komunitas keagamaan selalu dimaknai sebagai simbol keagamaan yang eksklusif dan pendiriannya selalu dinilai mengancam komunitas keagamaan lainnya.

Sementara UU No. 1/PNPS/1965 tidak jarang digunakan sebagai dalil untuk menghakimi komunitas keagamaan lain yang dianggap berbeda dengan mayoritas. Untuk Ahmadiyah, legitimasi ini semakin dikuatkan dengan SKB No.03 Tahun 2008 yang menganggap ajaran Ahmadiyah telah menodai "ajaran pokok Islam". Pada akhirnya, jika kekerasan terhadap Ahmadiyah harus diproses secara hukum, maka aparat hukum cenderung menjadikan korban sebagai tersangka karena terlanjur dinilai sebagai pihak yang telah menodai agama sesuai UU No. 1/PNPS/1965.

Belum lagi banyaknya perda-perda diskriminatif yang dipakai untuk melegitimasi aksi-aksi kekerasan terhadap kelompok-kelompok agama minoritas. Otonomi daerah yang diharapkan bisa memberikan kekuasaan baru bagi daerah untuk mengelola sumber daya alam mereka untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat, tetapi justru memberikan ruang baru untuk bermain-main dengan kekuasaan. KOMNAS Perempuan sendiri menemukan 186 perda diskriminatif terhadap perempuan pada akhir 2010, dimana salah satu faktor pendorong adalah cara pandang beragama yang sempit dan simbolik.

Konflik regulasi yang ada tentu saja berakibat cukup serius pada kondisi keberagaman di tanah air. Saya kira laporan tentang kekerasan yang terkait dengan kasus kebebasan beragama sudah cukup didokumentasikan oleh Setara, Wahid Institute, Center for Religion and Cultural Studies, Elsam, dan sebagainya. Meski demikian, saya ingin tetap mengajak pembaca untuk menyimak beberapa cuplikan fakta di masyarakat terkait dengan kemerdekaan beragama dan beribadat.

Fakta 1:

"Kami beribadah dilempari kotoran kerbau dan telur busuk setiap minggu. Kami merasa tidak nyaman dan terintimidasi. Jadi terpaksa kami beribadah membawa koran untuk duduk dan payung untuk menahan panas sekaligus menahan benda-benda yang sengaja dilempar oleh kelompok massa," (testimoni ibu Sedaria dari KHBP Pondok Timur Bekasi pada tanggal 27 Agustus 2010).

Fakta 2:

Seorang perempuan yang pada saat penyerangan terjadi sedang hamil 9 bulan memberikan kesaksian bahwa ketika massa merusak rumah dan menjarah barang dagangannya, ia mendengar massa penyerang menyatakan "*Urang kitu heula*" (kita perkosa dulu) yang ditimpali penyerang lain "*Da keur keureuneh*" (Dia lagi hamil)" tapi penyerang lain menyatakan "*Keun bae keur keureuneh oge dan heunceut na mah teu bareuh*" (Nggak apa-apa hamil juga kan vaginanya tidak bengkak –maksudnya membesar seperti perut perempuan hamil). Setelah kejadian tersebut korban bersama keluarga bersembunyi di hutan, dan pada hari ketiga melahirkan dengan kondisi susah, karena liang vagina tidak membuka dengan baik. Menurut korban, hal itu, karena ia masih merasa tertekan akibat penyerangan dan ancaman perkosaan. Korban melahirkan dengan bantuan *Enek Beurang* (dukun beranak), saat itu menurut korban ia tidak berani meminta bantuan bidan, karena takut tidak ditolong karena komunitasnya baru mengalami penyerangan (Catatan Awal Tahun 2012 Kebebasan Beragama, hal 55)

Fakta 3:

"...Di sela-sela keasikan ini, ada seorang anak kecil bernama Gracia yang tiba-tiba anak-anak serempak melarang dia untuk masuk dan melihat kearah Gracia. Kemudian mereka berkata kalau dia Kristen sehingga dilarang untuk ikutan. Dengan *defensive*, Gracia kemudian bilang kalau memang dia tidak mau ikutan. Lalu sayapun menjelaskan kalau ini untuk siapa saja, siapapun boleh belajar, karena semuanya adalah teman kita. Namun, sontak Gracia tidak ingin ikutan. Sayapun hanya tersenyum dan membiarkan dia ikutan menonton. Ketika saya memberikan selebaran kertas *Family Tree* kepada kawan-kawan yang baru terlibat, sayapun juga memberikan kepada Gracia. Saya bilang ini untuk dia. Diapun menerima dengan senang sekali apalagi kertas tersebut penuh dengan warna-warni dan bergambar kartun. Saya bilang lagi kamu iku-



tan saja kalau mau. Namun, dia bersikukuh kalau dia tidak ingin ikutan karena dia Kristen, dan Kristen biasanya tidak boleh bergabung dengan acara-acara Islam di kampung ini....(Catatan Harian Visna, CO UPC di Manggarai 26 Juni 2012)

Fakta pertama, dampak dari ketidakkonsistenan aturan negara telah mencerabut nilai dasar toleransi di masyarakat. Melakukan ibadah adalah hal privasi yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Karena ini adalah proses komunikasi tertinggi antara Tuhan dengan hambanya. Al-Quran sendiri sangat keras.

Fakta kedua, penegakan hukum yang lemah tentang perlindungan kemerdekaan beragama telah menurunkan standard moral masyarakat. Perempuan atau Ibu bagi orang Indonesia adalah representasi kehormatan dan kesucian. Perempuan bahkan ditempatkan pada derajat yang sangat tinggi sebagai pilar bangsa dan agama. Ironisnya, ketika kebencian terhadap yang berbeda menguasai emosi, justru perempuan atau ibu dijadikan sasaran utama untuk menghancurkan kehormatan dan kesucian sebuah komunitas. Bukankah menghancurkan kehormatan dan kesucian seorang perempuan Ahmadiyah, sama dengan menghancurkan kehormatan dan kesucian perempuan seluruh Indonesia dan bahkan dunia?

Fakta ketiga adalah pendidikan kebencian tampaknya sudah menyebar pada anak-anak generasi bangsa. Penolakan terhadap *the other* (yang berbeda), bukan lagi dilakukan oleh orang dewasa, tetapi anak-anak yang kita anggap seperti kertas putih, mulai belajar mengenali siapa "kami" dan siapa "mereka". Dimana anak-anak belajar nilai ini? Keluarga, PAUD, TPA, sekolah, tempat-tempat pengajian sangat rentan sebagai penyebar ajaran kebencian yang tanpa kita tahu telah mengukir sebuah "kebenaran palsu" tentang cara beragama dan bermasyarakat kita yang tertutup.

Sikap keterbukaan Visna pada cuplikan fakta ketiga, bukan saja menciptakan *confort zone* buat Gracia, tetapi juga mewakili suara alternatif yang senyap, untuk tetap mengingatkan bahwa ada banyak penganut agama dan budaya yang sepakat dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Suara kebenaran senyap ini, sering harus dipendam sedalam-dalamnya karena takut dikatakan "tidak islami". Sebuah cap yang seringkali dipakai oleh kelompok ekstrimis yang doyan melakukan kekerasan atas nama agama di negeri ini. Dapatkah *silent majority* bicara secara merdeka atas nama kemanusiaan?

### **Bisakah Silent Majority Berbicara?**

Ketika Gayatri Spevak mengajukan tesis "*can sub-*

*altern speak?*" tentu tidak sedang menunjuk pada persoalan kuantitas jumlah minoritas. Tetapi lebih melihat sejauh mana suara-suara minoritas didengar dan diakui sebagai bagian dari mayoritas. Masih lekat di ingatan saya, ketika sekelompok minoritas syiah di desa Nangkernang, Sampang diserbu oleh masa dan kemudian berdampak pada eksodus besar-besarnya pengikut syiah dari desa dan menempati pengungsian di GOR Sampang, selain kelompok-kelompok pejuang HAM, suara mayoritas tak terdengar. Banyak ulama bungkam karena takut dipetakan ideologi mereka. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tidak kompak dan hanya bisa berhitung politis atau tidak. Jika harus ada respon progresif, itu dilakukan secara individu bukan atas nama institusi. MUI Sampang harus membuat fatwa sesat untuk Syiah demi kepentingan politik, sementara MUI pusat hanya memberikan opini bahwa Sunni dan Syiah berbeda pada Fatma mereka Maret 1984. Apalagi, media lokal dan nasional cenderung menggiring pemberitaan pada wacana sesat dan penyesatan. Sikap politik diam mayoritas juga terjadi manakala kelompok Ahmadiyah diserang sekelompok massa dan dipaksa untuk kembali pada ajaran Islam mayoritas yang dianggap benar. Semua ini karena rasa kemerdekaan untuk bersikap sudah tidak ada. Bahkan kemerdekaan untuk menegakkan kebenaran harus menggunakan kalkulasi politik "kalau saya bersikap apa dampaknya bagi karir politik saya?".

Jika agama bagi mayoritas penduduk Indonesia masih dianggap sebagai *way of life* bagi pemeluknya, maka cara pandang dan tindakan harusnya sejalan dengan prinsip-prinsip universal agama yaitu mencintai kehidupan, berlaku adil, menempatkan penghormatan tertinggi atas hak-hak setiap orang, dan meyakini prinsip-prinsip non kekerasan, Kondisi ini menyiratkan makna bahwa masyarakat Indonesia masih percaya bahwa ajaran agama dapat memberikan kedamaian jiwa dan pikiran. Mayoritas bisa berkontribusi untuk mendukung kemerdekaan beragama dan beribadah, dengan mempromosikan tiga mekanisme yang bisa dipakai dalam mengembalikan fungsi agama sebagai sumber bina damai yaitu melalui mekanisme internal kelompok agama (*intra faiths*), dan mekanisme antar kelompok agama (*inter faiths*).

**Intra faiths dialogue** adalah mekanisme internal suatu komunitas agama, dimana pemeluk agama mengembangkan wacana dan pendekatan terhadap ajaran agama yang lebih mendukung pada upaya-upaya perdamaian. Reinterpretasi ajaran dan simbol-simbol keagamaan perlu dilakukan, manakala wacana dominan mengarah pada perusakan hubungan antar manusia dan alam. Misalnya interpretasi terhadap wacana dar al-islam, yang sering sekali ditafsirkan seb-

agai Negara Islam dengan aturan-aturan yang memdomestikasi perempuan. Kenapa kita tidak menafsirkan dar al-islam sebagai negeri perdamaian, dimana hak-hak perempuan dan laki-laki dihormati. Bahkan jika memang kita berkehendak, dar al-islam bisa dimaknai bukan secara fisik adanya Negara Islam, tapi terimplementasinya nilai-nilai perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat rakyatnya, karena dalam konteks ke-Indonesia-an yang majemuk tentunya akan banyak sulit menemukan formulasi "Negara Islam", karena interpretasinya dipersempit pada simbol-simbolnya bukan pada esensinya.

Pengetahuan tentang berbagai jenis aliran di dalam agama seharusnya dipelajari sebagai bagian dari sejarah perkembangan agama itu sendiri. Perbedaan mazhab, aliran dan sekte di dalam agama apapun secara wajar bisa dijadikan bahan untuk dialog sehingga pemahaman penganut agama tertentu akan mendapatkan gambaran komprehensif tentang keragaman cara menafsir ajaran agama. Ini juga harus didukung oleh pemimpin agama yang berkomitmen mengembangkan cara pandang multicultural dan pluralisme. Pergaulan multikultural semacam ini akan memperkuat pengetahuan dan kesadaran umat beragama untuk tidak saling melakukan klaim kebenaran.

**Interfaith dialogue** secara sederhana dipahami sebagai proses memahami ajaran dan tradisi agama dan kepercayaan orang lain adalah sebuah proses panjang belajar manusia yang tidak mungkin tuntas dalam dua jam forum formal dialog. Dialog jangan dipahami kita harus setuju. Dialog mewajibkan kita memahami tradisi beragama orang lain, yang kemudian dimanifestasikan dalam bentuk aksi nyata. Olehkarena dialog terkait dengan teologi lebih sulit dibandingkan dengan dialog tentang nilai-nilai universal seperti friendship (pertemanan), solidaritas dan prinsip-prinsip nir kekerasan. Jika memang dialog teologi harus terjadi, maka bukan kebenaran tunggal yang dijadikan rebutan. Karena interpretasi kebenaran pada tiap agama mungkin saja berbeda. Sehingga akan lebih sehat jika mencari common ground setiap komunitas agama lebih diutamakan agar upaya-upaya mendorong kerjasama komunitas antar iman. Misalnya kerja-kerja kemanusiaan saat emergensi sangat penting muncul dengan wajah inter faiths, agar masyarakat juga belajar cepat tentang keniscayaan bekerja bersama dengan komunitas antar iman.

Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) juga bisa dipakai sebagai mekanisme yang menjaga hubungan komunitas antar iman. Forum ini bisa dijadikan penopang komunitas antar iman agar keharmonisan hubungan antar anggota bisa tetap terjaga.

**Mekanisme antar kelompok agama-agama** yang dimaksudkan di sini adalah sebuah forum dialog ditingkat masyarakat yang bisa difungsikan sebagai forum penyelesaian persoalan yang bersifat terbuka dan nyaman buat semua golongan. Ketegangan antar kelompok, terpinggirkannya minoritas agama dari sistem sosial kita, perencanaan yang tidak partisipatif, penyelesaian persoalan yang top down, ditambah dengan tidak ada forum bersama, akan mempermudah tersulutnya konflik kekerasan.

## Kesimpulan

Merdeka itu berdaulat. Artinya menggunakan kapasitas diri untuk menentukan cara pandang dan sikap dalam merespon segala sesuatu tanpa tergantung pada kekuatan apapun dan siapapun. Karena merdeka menyiratkan makna positif, maka penggunaan kata merdeka seharusnya tidak pada hal-hal yang bisa menimbulkan dampak negatif. Kemerdekaan Beragama dan Beribadat seharusnya diletakkan pada konteks menjaga eksistensi setiap kelompok sebagai hal yang alamiah ada di bumi Indonesia. Olehkarena, tidak berlebihan jika UUD 1945 dan dua aturan internasional yaitu ICESCR dan ICCPR sangat kental nuansa perlindungan terhadap kemerdekaan beragama dan beribadat. Sehingga sudah selayaknya aturan-aturan yang kontradiktif dengan ketiga aturan tersebut, harus direvisi. Apalagi sudah terbukti bahwa aturan-aturan yang diskriminatif terhadap minoritas agama dan juga terhadap perempuan dipakai untuk melegitimasi aksi-aksi kekerasan yang mengatasnamakan jihad kebenaran agama tertentu.

Kacaunya produk hukum kita dan lemahnya sistem penegakan hukum membuat anarkisme mendapatkan tempat. Mayoritas yang tidak sepekat dengan kekerasan sudah saatnya berbicara dan menentukan sikap. Upaya-upaya dialog di internal agama dan antar agama harus diperbanyak untuk memperkuat kerjasama dalam merespon persoalan-persoalan sosial, termasuk mendorong agar mekanisme penyelesaian persoalan di tingkat masyarakat berfungsi dengan baik untuk semua golongan. Sehingga setiap permasalahan bisa dikomunikasikan secara terbuka dan dicarikan jalan keluar yang tetap menjaga kemerdekaan setiap orang untuk beragama dan beribadat. Karena pada hakekatnya agama itu jalan damai, bukan jalan perang.\*\*\*\*\*

-----  
\*) **Ruby Khofifah** Direktur Eksekutif *The Asian Muslim Action Network (AMAN Indonesia)*

# Makna Pluralisme Bagi Perempuan

Setiap tanggal 17 Agustus, Negara Republik Indonesia memperingati Hari Kemerdekaannya, yang diproklamkan pada tahun 1945. Artinya, pada tahun ini Negara Republik Indonesia telah menginjak usia yang ke-67 tahun. Peringatan hari kemerdekaan kali ini diperingati dengan suka cita di beberapa tempat di wilayah negeri ini. Anggaran besar pun dikeluarkan untuk memperingati hari kemenangan tersebut. Dalam peringatan HUT di Istana Merdeka misalnya, menelan dana hingga Rp 7,83 miliar. Jumlah yang sangat fantastik untuk kegiatan selama sehari. Namun, apakah negara ini sudah benar-benar merdeka? Atau, kemerdekaan itu hanya menjadi milik segelintir orang? Bisa saja kemerdekaan itu hanya dimiliki oleh mereka yang mayoritas, sementara yang minoritas masih memperjuangkan kemerdekaan atas dirinya.

Negara Republik Indonesia terdiri atas beragam suku, bahasa, agama adat dan budaya. Untuk itu, negara ini menganut semboyan "Bhineka Tunggal Ika", yang artinya "berbeda-beda tetapi satu". Semboyan ini memberikan pengakuan atas keberagaman yang ada yang harus menjadi kekayaan negeri ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD 1945 juga telah menjamin warga negara untuk dapat memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, seperti tertuang dalam Pasal 28E Ayat 1, yang berbunyi: "Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali". Demikian pula dengan ayat 2 pasal 28E.

Meskipun konstitusi telah menjamin kebebasan tiap orang, ironisnya kebebasan itu hanya kata-kata. Kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut kepercayaan serta kebebasan berekspresi dan berserikat menjadi hal yang sulit diperoleh. Perbedaan yang ada telah melahirkan penindasan baru kaum mayoritas atas kaum minoritas. Apa yang terjadi pada pembubaran diskusi Irsad Manji di Jakarta maupun di Jogjakarta, beberapa waktu lalu, contoh nyata tidak adanya penghormatan atas perbedaan yang ada setulus-tulusnya.

Demikian juga penyerangan terhadap komunitas Ahmadiyah yang merupakan bagian dari penolakan sekelompok orang terhadap keberagaman. Pada situasi itu, perempuan mengalami kekerasan dan diskriminasi tidak saja berbasiskan keyakinan beragama



tetapi juga karena identitas mereka sebagai perempuan. Penolakan terhadap pluralisme memperkuat kekerasan dan diskriminasi berbasiskan gender. Akibatnya, perempuan menanggung lebih banyak pelanggaran hak dibandingkan laki-laki.

## Bagaimana kita memaknai pluralisme?

Yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara yang beragam. Kebhinekaan menjadi keharusan yang hakiki. Jika melihat sejarah dan realitas keberagaman yang ada, seharusnya dapat dimaknai sebagai realitas yang nyata ada, karena memaknai pluralitas sama artinya menghargai perbedaan. "Pluralisme di Indonesia selayaknya menjadi cara pandang tiap orang. Hanya dalam praktiknya, banyak orang yang tidak setuju dengan pluralisme, menurut saya ini pengingkaran terhadap realitas yang sehari-harinya ada. Mereka yang meyakini bahwa pluralitas itu ada (kaum pluralis) serta merta dicap sebagai orang liberal, karena mau menghargai orang yang memiliki perbedaan cara pandang bahkan pada orang yang cara pandangnya menciderai apa yang dipercaya (agama dan identitas lainnya). Menurut saya, pemahaman seperti ini seolah menggeneralisir bahwa semua orang sama. Persoalan ini yang masih menjadi tantangan besar pluralisme ataupun multikulturalisme di Indonesia", ungkap Ika Ayu dari Lembaga Studi Islam dan Politik.

Sementara Itu, Budi Wahyuni, dari Pusat Studi





**Ika Ayu**



**Budi Wahyuni**

Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gajah Mada memandang bahwa keberagaman yang ada adalah hal yang sangat luar biasa. Oleh karena itu harus menghargai satu dan lainnya. Namun sayang, saling menghormati itu sering disalahgunakan untuk perilaku yang tidak sesuai dengan penghormatan terhadap keberagaman itu sendiri. Karena yang terjadi cenderung menyeragamkan atas nama keberagaman.

Dalam diri perempuan, yang selama ini masih diposisikan pada kelamin kedua (second sex), pluralisme menjadi rumit untuk dimaknai. Hal itu karena ketika ditarik dalam kehidupan perempuan, dalam pluralism perempuan kesulitan harus mengartikulasikan pilihan-pilihan dirinya, secara privat maupun publik. "Dalam konteks Indonesia, di mana masih banyak masyarakat dengan paham patriarkis dan belum 'mengafirmasi' modernitas sepenuhnya, perempuan dihadapkan pada pilihan yang menyulitkan terkait dirinya. Pilihan untuk menikah tidak menikah, menjalani rumah tangga sendiri atau bersama pasangan, memiliki anak atau tidak memiliki anak, menyatakan identitas gender dan orientasi seksualnya; dan sekian kerumitan lain yang berkelindan dengan ikatan sosial budaya yang memarjinalisasi perempuan", demikian Ika Ayu.

"Tetapi jumlah perempuan dari kelas menengah ke bawah hanya memiliki dua pilihan, menjalani pilihan yang sudah ditetapkan atas dirinya atau menjadi 'liyan' yang 'hina' di dalam masyarakat, lebih dominan dari sisi jumlah. Realitas seperti itu menurut saya menjadi realitas plural bagi perempuan. Saya sebagai perempuan pun memaknai realitas yang bermacam-macam yang saya yakin tak datang dari ruang yang kosong sebagai bagian dari pluralisme. Faktanya, ia ada dan hidup. Tapi sering pluralitas ini diabaikan", lanjut Ika Ayu.

Menanggapi hal itu, Budi Wahyuni berpendapat bahwa secara konstruksi sosial, sesungguhnya perempuan penuh empati terhadap kehidupan orang lain

termasuk perbedaan agama. Sayang, perempuan harus dipimpin oleh orang lain yang belum tentu sepakat dengan pendapat perempuan. Hal ini yang kadang menimbulkan posisi sulit bagi perempuan, sehingga yang terjadi seolah-olah perempuan tak punya prinsip dan hanya mengikuti arus untuk menghindari konflik.

### **Tantangan perempuan**

Melawan ketertindasan dan dominasi kepemimpinan menjadi tantangan yang sangat besar yang harus dihadapi perempuan saat ini. Diperlukan kemampuan dan kemauan untuk melawan ketertindasan tersebut. Untuk itu, mewacanakan bahwa pluralitas ada dalam kehidupan masyarakat dan perempuan perlu untuk menegosiasikannya, menjadi hal yang penting untuk dilakukan. "Perempuan relatif tidak terbiasa dengan perbedaan pendapat dengan cara mengungkapkan pendapatnya. Perempuan tidak terbiasa mengambil resiko, yang terjadi bukan menghormati keberagaman tetapi meng "hakimi" nilai tertentu atau negatif", demikian Budi Wahyuni.

Ada anggapan bahwa pluralisme hanya terkait dengan soalan agama, yang menjadi masalah baru bagi perempuan. Seharusnya, ketika bicara pluralisme tak sebatas soal agama, tetapi karena agama dijadikan rujukan nilai kebenaran maka keberagaman beragama menjadi lebih sering digunakan. "Agama hanya satu bagian kecil yang harus juga dibaca dengan pluralisme. Ingkar terhadap adanya pluralitas--yang kemudian disepakati melalui paham pluralisme--merupakan pengingkaran terhadap keberadaan Tuhan (jika mempercayai adanya Tuhan) dan juga sesama manusia. Pluralisme adalah "isme" yang sangat luas", tambah Ika Ayu.

Untuk itu, dalam kehidupan yang beragam, prinsip menghormati orang lain, menghormati perbedaan, menjadi hal yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang damai dan sejahtera. Dengan demikian, akan terbuka menerima tiap perbedaan dan mampu memaknai realitas yang plural. Ika Ayu menekankan sikap terbuka tersebut harus dibarengi dengan kesadaran kritis yang harus selalu dibangun dan direproduksi. Hal tersebut berangkat dari kondisi perempuan yang menurutnya menjadi korban atas kuatnya maskulinitas yang terus-menerus direproduksi.

Keberagaman yang ada harusnya dapat dijadikan basis berpikir sekaligus sebagai kekuatan. Karena keadilan bagi perempuan tidak akan terwujud, jika perempuan tidak bersatu dan bersolidaritas. Keberagaman yang ada harus dipahami sebagai realitas yang faktual oleh perempuan itu sendiri. Karena hal tersebut memiliki konsekuensi logis pada pilihan-pil-

ihan sikap dan posisi perempuan di luar dirinya.

Menurut Budi Wahyuni, keberagaman yang ada sangat mungkin menjadi titik temu menuju keadilan perempuan, karena agama adalah penuntun manusia berkehidupan, vertikal dengan Tuhan dan horizontal dengan komunitas sosial. "Untuk menggapai tingkat yang lebih dekat dengan Tuhan, maka manusia akan berbuat baik dengan sesamanya. Keadilan menjadi salah satu indikatornya. Keadilan menjadi perekat agar sesama manusia tidak mengeksploitasi, melakukan kekerasan dan lainnya", ucapnya.

### Peran negara dalam melindungi perempuan

Pemerintah sebagai pemegang mandat layanan publik mempunyai peran yang signifikan untuk memberikan perlindungan terhadap tiap warga negara. Negara harus membuat tiap warga negaranya aman dari perilaku kekerasan, ketidakadilan dan sebagainya. Perlindungan negara dapat dilakukan melalui perangkat kebijakan dan implementasinya oleh aparatus negara. "Perlindungan tersebut perlu dimaknai dari kacamata perempuan, bukan dalam kacamata negara (karena cenderung patriarkis dan maskulin) dalam melindungi perempuan yang sepenuhnya harus dilindungi justru membawa pada satu kondisi tertindas", demikian Ika Ayu.

Ika menambahkan bahwa saat ini komitmen negara dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan masih suam-suam kuku. "Saya cenderung melihat negara masih melihat perempuan di Indonesia sebagai agensi pendukung (sebagai konsekuensi pemahaman terhadap second sex), bukan aktor utama. RUU Kesetaraan gender, pengarusutamaan

gender di tiap perangkat negara, berbagai kebijakan yang disebut-sebut pro perempuan, belum mampu menjawab persoalan perempuan saat ini yang makin dinamis terutama dalam diskursus kontemporer. Saya melihat masih perlu revolusi kebudayaan sebagai salah satu jalan menuju keadilan perempuan".

Di sisi lain, Budi Wahyuni berpendapat bahwa negara belum sepenuhnya berkomitmen terhadap perlindungan perempuan, karena perempuan korban kekerasan masih berjatuh. "Hal ini tidak bisa dilepaskan dari bagaimana kebijakan diambil dan dikawal secara konsisten. Perlindungan di ranah pendidikan, ketenagakerjaan, ekonomi, politik, konflik perebutan lahan, PRT, pekerja seks, perempuan sulit hamil, nikah dini, dan penularan HIV/AIDS pada perempuan", lanjut Ika Ayu.

### Penutup

Pluralisme adalah kondisi nyata yang ada di negara ini. Sikap saling menghormati dan terbuka menerima segala perbedaan yang ada menjadi kunci utama untuk menciptakan kehidupan yang adil dan beradab, sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa ini. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia akan terwujud ketika rasa saling menghormati dapat terus dibangun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tak ada mayoritas maupun minoritas, yang ada hanyalah seluruh warga negara Indonesia yang hidup rukun untuk mencapai suatu tujuan secara bersama-sama.\*\*\*\*\* (JK)



## #BedaIsMe: Gerakan Merayakan Keberagaman

Suatu perubahan bisa dilakukan kalau memang ada niat dari yang menginginkannya. Namun niat saja, itu akan menjadi hal yang sulit untuk terwujud. Memang tak ada kata terlambat untuk memulai suatu perubahan, tetapi perubahan untuk kebaikan memang lebih baik dimulai sejak dini. Anak muda dapat menjadi pelaku perubahan, karena ia masih memiliki gairah yang mengebu-ngebu. Maka sering banyak harapan ada di pundak kaum muda.

Semangat kaum muda untuk membuat perubahan itulah yang diusung gerakan #BedaIsMe, sebuah gerakan yang memiliki tujuan memperkuat solidaritas sesama anak bangsa untuk hidup dan merayakan keberagaman di Indonesia. Namun demikian, pesan-pesan yang disampaikan oleh gerakan ini bukan hanya persoalan orang muda, melainkan masalah yang bisa menimpa semua orang, baik tua, muda, laki-laki dan perempuan. "Mengajak orang muda karena mereka masih punya stamina yang panjang" demikian Daniel Awigra dari Human Rights Working Group (HRWG), selaku koordinator gerakan ini mengungkapkan.

Di samping itu, masa depan bangsa juga ada di tangan orang muda, karena mereka masih memiliki energy yang cukup untuk itu. Mereka sering disebut penerus masa depan, namun apa jadinya jika yang meneruskan adalah generasi yang korup? Generasi yang melakukan tindak diskriminasi dan kekerasan atas sesamanya? Maka itu sebagai penerus masa depan bangsa, mereka harus mendapatkan kepercayaan yang penuh. "Saya tidak setuju kalau dikatakan orang muda itu penerus masa depan, karena kalau generasinya korup kayak sekarang, anti Ahmadiyah dan

lain sebagainya, apakah kita akan meneruskannya? Saya ingin orang muda sebagai pemilik dan penentu hari depan bangsa. Karena kita yang harus melakukan perubahan itu, bukan orang tua, dan orang muda masih punya cukup energy untuk melakukan perubahan itu", tambah Awi.

Gerakan #BedaIsMe lahir berangkat dari maraknya aksi intoleransi yang berkedok agama, yang belakangan mengemuka. "Gerakan ini berangkat dari gerakan tertindas, gerakan yang terdiskriminasi, orang-orang sadar bahwa ada kelompok-kelompok yang belum terpenuhi hak-haknya, maka ingin menuju ke persamaan pemenuhan hak". Awi menjelaskan.

Beberapa aksi intoleransi yang tercatat yang melatarbelakangi lahirnya gerakan ini antara lain: Penyegehan GKI Yasmin Bogor, HKBP Filadelfia Bekasi, 17 gereja di Singkil Aceh, penyerangan warga Syiah Sampang, tidak meredanya kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah, penyerangan diskusi Irshad Manji di LKiS Jogjakarta, Kegagalan konser Lady Gaga di Jakarta, serta beberapa aksi lainnya. Selain itu, gerakan ini juga lahir dalam rangka memperingati 4 tahun tragedi Monas, di mana pada 1 Juni 2008 ketika massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) tengah aksi damai merayakan hari lahir Pancasila di Monas, maka FPI menyerang secara membabi buta. Banyak peserta aksi yang terluka parah.

Tragedi Monas terjadi karena absennya negara atas berulangnya aksi-aksi intoleransi dan kekerasan kelompok-kelompok ekstrim yang mengatasnamakan agama. Pemaksaan paham dan keyakinan oleh mereka kepada pihak-pihak yang berbeda tak cukup dengan merusak tempat tinggal, rumah ibadah, sekolah, dan sebagainya, bahkan mencelakai sesama anak bangsa. Lebih tragis lagi, penyerangan massa terhadap jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Banten, pada 6 Februari 2011 merenggut 3 nyawa. "Sikap negara terhadap beberapa kasus, Cikeusik misalnya, ketika dalam hal ini polisi sudah tahu akan ada penyerangan, kok tidak ditangkap yang menyerang? Malah menghimbau untuk diamankan, cara-cara negara menangani kekerasan bukan pelakunya yang ditangkap. Logikanya sudah terbalik, justru negara memfasilitasi penyerang", demikian Awi menjelaskan.

Gerakan #BedaIsMe yang dimulai tepat pada hari lahirnya Pancasila setiap 1 Juni ingin mengingatkan kembali kepada bangsa kita bahwa Pancasila adalah







**Daniel Awigra**

akan ini mencoba untuk memberikan banyak pemikiran kepada masyarakat agar dapat menanamkan rasa toleran yang besar dalam kehidupan mereka.

Dengan berpegang pada prinsip anti kekerasan, #BedalsMe memberikan ruang pada kreativitas budaya di mana tiap masyarakat mempunyai ekspresi dan media yang berbeda untuk merayakan keberagamannya. "Yang ingin ditekankan, bahwa bagaimana kita mendukung pemerintah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945. Selama ini, yang dilakukan negara, yakni korban yang dievakuasi, bukan mengamankan siapa yang menyerang", kata Awi.

Dalam pekan #BedalsMe antara tanggal 1-10 Juni 2012 beberapa kegiatan yang diadakan, misalnya pameran foto korban kekerasan atas nama agama di Café Tjikini, yang memberi ruang kepada korban, khususnya korban kekerasan atas nama agama untuk bersuara, dengan semangat "giving voice to the voiceless!" Selain pameran foto, beberapa rangkaian acara lain: Aksi solidaritas terhadap Little Monster yang kecewa atas gagalnya konser Lady Gaga di Jakarta, 3 Juni 2012; Konferensi Pers Merespon Hasil Universal Periodic Review Dewan HAM PBB di Komnas Perempuan, 4 Juni 2012; Pemutaran Film, Prayer for Bobby, di Kafe Tjikini, 6 Juni 2012; Diskusi Sekolah Agama ICRP, Kafe Tjikini, 8 Juni 2012; Apel akbar, "Aku Cinta Indonesia" di Monas, 10 Juni 2012; Diversity Concert: Tribute to the Victims of Religious Violence, TIM, 10 Juni 2012.

Berdasarkan keprihatinan bersama terhadap meningkatnya aksi-aksi intoleransi atas nama agama dan pengabaian negara atasnya, maka gerakan #Bedalsme membuat maklumat yang intinya mengajak segenap elemen bangsa:

1. Menyelamatkan Pancasila dari upaya-upaya pemaksaan dan penyeragaman yang mengatasnamakan agama,
2. Memulihkan martabat bangsa dengan menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tegas memerintahkan aparat negara menegakkan konstitusi dan mematuhi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi,

3. Menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengambil tindakan nyata atas komitmen pemerintah Indonesia dalam sidang Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB di Genewa 23-25 Mei 2012 untuk secara tegas menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama,
4. Menuntut negara tidak berada di bawah tekanan dan kontrol kelompok-kelompok agama yang intoleran,
5. Menuntut negara menindak tegas pelaku aksi-aksi kekerasan atas nama agama,
6. Mendesak pemerintah untuk merevisi UU No.1/PNPS/1965 sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU-VII/2009 of 2010,
7. Mendesak pemerintah untuk menghapus kebijakan dan praktik diskriminasi dalam pembangunan rumah ibadah dan merevisi SKB 2 Menteri tentang Pembangunan Rumah Ibadah serta mencabut seluruh kebijakan yang restriktif dan diskriminatif, baik di tingkat pusat maupun daerah.\*\*\*\*\* (JK)



# Tafsir Agama dan Budaya Sumber Diskriminasi Terhadap Perempuan

Oleh: Estu R. Fanani\*)

Sebagai salah satu negara yang meratifikasi konvensi CEDAW, Juli 2012 yang lalu, Indonesia mendapatkan kesempatan untuk melakukan dialog konstruktif dengan Komite CEDAW PBB untuk Laporan Negara Indonesia periode ke-6 dan ke-7 dalam sesi Sidang Komite CEDAW yang ke-52, di PBB, New York. Seperti diketahui, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (Konvensi CEDAW) melalui UU No. 7 tahun 1984. Dengan meratifikasi Konvensi CEDAW, berarti negara Indonesia mengakui adanya diskriminasi terhadap perempuan di segala bidang kehidupan dan Indonesia berkewajiban melakukan langkah-langkah penghapusan hal itu. Sebagai negara Pihak, Indonesia juga berkewajiban memberikan informasi perkembangan pelaksanaan Konvensi CEDAW di Indonesia dengan mengirimkan Laporan Negara ke Komite CEDAW PBB setiap empat tahun sekali.

Salah satu isu yang menjadi pertanyaan komite CEDAW adalah adanya praktik sunat perempuan di Indonesia yang dipertegas dengan Permenkes No. 1636 Tahun 2010. Isu ini mendapatkan perhatian yang cukup tinggi dari Komite, karena saat negara-negara lain menghapuskan praktik-praktik diskriminatif, justru Indonesia mengeluarkan peraturan yang mengarah pada dukungan terhadap praktik-praktik kekerasan terhadap perempuan. Selain Sunat Perempuan, ada banyak isu lain yang dipertanyakan Komite CEDAW, terkait adanya diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia. Apa saja isu-isu tersebut? Apakah diskriminasi terhadap perempuan yang terus berlangsung ada hubungannya dengan keberagaman?

Redaktur pelaksana Buletin Perempuan Bergerak, Joko Sulisty, berkesempatan melakukan wawancara dengan Estu Rakhmi Fanani, Koordinator *CEDAW Working Group Indonesia* (CWGI).

**Bagaimana Anda memaknai pluralisme di Indonesia?**

Secara pribadi, saya memaknai pluralisme di Indonesia seperti kita dulu mempelajari Bhineka Tunggal



Estu R. Fanani

lka; menyadari bahwa Indonesia terdiri atas banyak ragam dan hal yang berbeda. Menurut saya, kalau bisa jangan dilupakan dan diseragamkan. Kita harus mengakui dan menghormati perbedaan, dan bagaimana kita mempraktikkan untuk menghormati perbedaan itu. Menghargai dan memaknai perbedaan diri kita, dalam perilaku kita di lingkungan. Keberagaman itu ada berbagai macam, seperti bahasa, agama, kepercayaan, orientasi seksual dan lainnya, karena unsur dalam manusia itu banyak, baik dalam dirinya maupun dari lingkungannya.

**Bagaimana pluralisme dalam realitas kehidupan perempuan?**

Artinya, ketika kita melihat lebih spesifik ke perempuan, maka perbedaan-perbedaan itu kemudian dipertajam. Kalau kita lihat dalam praktik-praktik sosial budaya di Indonesia yang masih patriarkhal, maka perempuan masih dinomorduakan atau masih minoritas. Kemudian kalau kita melihat keberagaman

itu, maka kita melihat siapa di dalamnya, di situ ada perempuan, anak, laki-laki dan gender lainnya. Ketika keberagaman itu tidak dihormati atau dinafikan masyarakat, yang lebih merasakannya adalah perempuan.

### **Apakah pluralisme hanya terkait soal agama semata?**

Saya pribadi memaknai keberagaman itu tidak hanya soal agama, tetapi banyak hal. Hanya sekarang yang berkembang di masyarakat bahkan di lingkungan LSM, ketika berbicara tentang pluralism, itu dikaitkan dengan agama. Saya pribadi melihatnya dari banyak hal, misalnya agama, kepercayaan, suku, orientasi seksual dan sebagainya.

### **Bagaimana perempuan menyikapi keberagaman tersebut?**

Kalau kita percaya manusia itu adalah individu-individu yang berbeda, kita harus memaknai itu dalam diri kita bahwa kita tidak sama dengan orang lain, dan kita harus menghormati itu. Jangan memaksa orang lain sama dengan diri kita, tetapi bagaimana menjembatani itu. Berarti harus ada dialog atau komunikasi. Kewajiban kita adalah menghormati hak asasi orang lain. Jadi, bagaimana kemudian kita berusaha meminimalisir tidak menyerang atau meniadakan atau menindas orang lain karena perbedaannya.

### **Bagaimana kebebasan berekspresi dalam kehidupan yang beragam kini?**

Dalam kaitan kebebasan berekspresi, kita bisa melihat perbedaannya. Kalau berkaitan dengan perbedaan agama, sebenarnya berekspresi dalam hal menjalankan agama atau beribadah itu lebih pada bagaimana kita aman dan nyaman menjalankan ibadah tanpa terganggu orang lain atau tanpa diintimidasi oleh orang lain. Paling memungkinkan ketika kita mengekspresikan untuk menjalankan agama atau kepercayaan atau apapun keyakinan kita dengan aman, itu yang kita inginkan. Kemudian ekspresi yang berkaitan dengan suku dan budaya, selama kita masih bisa menjalankan itu dengan semestinya, misalnya kita menggunakan bahasa Jawa dengan orang bukan Jawa tentu tidak sambung, kemudian tidak akan maknanya. Jadi, kita harus tahu di mana batasannya. Kemudian untuk orientasi seksual, yakni mengekspresikan bagaimana menjadi diri kita, bagaimana kemudian kita menjadi orang yang maju. Ketika karena

perbedaan itu kita tidak bisa mengekspresikannya, misalnya dibatasi tidak boleh berkumpul atau tidak boleh memberikan pendapat, tidak boleh memajukan diri, akhirnya sudah ada upaya untuk membatasi hak-hak kita.

### **Mengapa mereka yang mempunyai orientasi seksual berbeda sering didiskriminasi?**

Karena mereka dianggap berbeda dari yang umum, maka mereka mengalami diskriminasi. Selain itu, masyarakat kita sendiri berpegang pada mayoritas atau yang kebanyakan. Kalau tidak ikut yang banyak, akan dicibir atau bagaimana. Nilai-nilai yang digunakan ialah nilai-nilai yang dikembangkan oleh yang mayoritas. Ketika dalam orientasi seksual ini yang mayoritas adalah heteroseksual, maka itu yang dianggap ideal. Ketika ada yang memiliki orientasi seksual di luar itu, maka dianggap berbeda dan tidak benar. Dari itu muncul tindakan-tindakan lain, seperti diskriminasi dan kekerasan terhadap mereka yang mempunyai orientasi seksual berbeda.

### **Bagaimana peran negara dalam melindungi tiap warganya?**

Masih jauh dari harapan kita bersama. Yang kita harapkan negara tampil dalam kondisi benar-benar menghormati hak-hak asasi perempuan, namun itu masih sangat jauh. Dalam bidang hukum atau pun sosial banyak masalah. Dalam menghormati masih beberapa hal yang perlu ditekankan dan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia dalam memenuhi kewajibannya. Dalam menjamin, meskipun semuanya sudah terpenuhi dalam konstitusi, ternyata banyak yang kurang, misalnya bidang hukum masih banyak perempuan yang merasa hak-haknya dilanggar karena diperlakukan tidak adil di muka hukum.

### **Bagaimana komitmen negara dalam menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan?**

Komitmen negara kalau kita melihat di forum-forum internasional, terutama di forum PBB, pemerintah menyatakan sudah menghormati dengan menyatakan membuat ini dan itu. Namun, bagaimana tingkat pelaksanaannya? Yang paling penting, apakah benar-benar masyarakat perempuan mendapatkan manfaat dari peraturan, kebijakan, program, anggaran dan lainnya yang dilakukan pemerintah yang menjadi kewajiban negara? Kalau kita melihat lebih jauh ternyata banyak yang kurang, karena tinjauan atas masing-



masing bidang masih banyak yang bolong-bolong.

**Pada Juli 2012 lalu, Indonesia mendapatkan kesempatan untuk melakukan dialog konstruktif dengan Komite CEDAW, apa yang terjadi dalam forum tersebut?**

Di sana Indonesia menjadi salah satu negara yang cukup dilihat, karena keberagamannya. Hampir semua isu PBB di Indonesia ada, misalnya isu *indigenous people*, perempuan pedesaan, lingkungan, pertumbuhan, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan atau yang menjadi bahan diskusi hampir merata. Di semua pasal CEDAW, ada pertanyaan-pertanyaan yang penting yang cukup komprehensif dilihat oleh komite atas Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti perkembangan di Indonesia. Misalnya tentang politik atau peraturan-peraturan yang ada, mereka sangat paham bagaimana sistem hukum Indonesia. Beberapa hal yang menjadi pertanyaan komite adalah tentang politik, bagaimana pelaksanaan kuota 30% keterwakilan perempuan, pelaksanaannya sejauh mana? Demikian dengan isu kesehatan yang menjadi sorotan dengan adanya Permenkes Meteri Kesehatan soal sunat perempuan, praktik-praktik yang dilindungi oleh negara. Sementara di perempuan pedesaan dan kekerasan karena perbedaan agama, juga menjadi sorotan komite CEDAW. Sikap pemerintah seperti apa dan bagaimana komitmennya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut kemudian ditanyakan Komite CEDAW. Tetapi jawaban pemerintah Indonesia di forum PBB itu sangat diplomatis. Misalnya, soal Permenkes tentang sunat perempuan. Mereka menyatakan akan meninjau kembali dengan melibatkan tokoh agama. Padahal selama ini sudah dilakukan hanya seperti apa keputusan yang diambil oleh pemerintah, itu yang diinginkan oleh Komite. Sampai akhirnya, Komite CEDAW menilai bahwa proses legislasi atau pembuatan kebijakan dalam pengambilan keputusan masih diperlukan ketegasan, dalam hal ini mempunyai perspektif terhadap kesetaraan dan keadilan bagi perempuan Indonesia.

**Ketika melihat masalah yang ditanyakan Komite CEDAW, apakah hal tersebut terkait dengan keberagaman dan praktik beragama di Indonesia?**

Sangat terkait, apalagi contoh sunat perempuan dan kebetulan yang menanyakan adalah orang-orang atau komite-komite yang berasal dari negara Islam. Mereka dengan tegas menyatakan bahwa sunat perempuan tidak terkait dengan agama, tetapi

kenapa di Indonesia terkait dengan agama? Itu yang mereka heran. Kemudian bagaimana relasi dengan agama itu ditentukan? Karena sunat perempuan terkait dengan praktik-praktik budaya yang akhirnya kawin dengan agama, yang makin memperparah kondisi perempuan dan keberagaman budaya Indonesia, yang kental di beberapa daerah. Ketika dalam praktik kebiasaan di masyarakat itu tidak dapat dibedakan lagi, maka ini menjadi praktik agama. Selain itu, ulama mencampuradukan itu, sehingga memperburuk kondisi yang ada, dan perempuan juga menginternalisasinya karena memang itu yang mereka dapatkan.

**Bisakah keberagaman ini menjadi titik-temu bagi keadilan perempuan Indonesia?**

Bisa saja, tetapi membutuhkan sumberdaya dan energi yang cukup banyak serta keterlibatan semua pihak, kelegaan hati bagi semua pihak, ketika misalnya semua orang mau mengubah aturan atau norma-norma, adat, budaya dan tafsir agama itu sendiri. Kemudian negara mau mengakomodir hal tersebut dengan melihat kembali hukum-hukum yang ada. Itu bisa menjadi titik-temu bagi keadilan perempuan. Tetapi kalau itu tidak bisa, maka perempuan bersama komunitasnya atau kelompok pendukungnya harus mencari jalan alternatif untuk mencapai keadilan itu, apakah melalui jalur litigasi atau non litigasi, itu menjadi strategi tersendiri.\*\*\*\*\* (JK)

# Irshad Manji: Mimpi Buruk Osama bin Laden

Pada Mei 2012 lalu, nama Irshad Manji ramai diperbincangkan publik Indonesia. Berbagai media baik cetak maupun elektronik memberitakan tentang keberadaannya di Indonesia. Di beberapa media sosial dan *mailing list*, nama Irshad Manji menjadi bahan diskusi yang sangat menarik. Pro dan kontra pun disampaikan dalam setiap diskusi. Bahkan ditempat-tempat ibadah, seperti di Masjid, namanya di sebut-sebut dalam khotbah Jumat.

Nama Irshad Manji mulai disebut-sebut ketika ia hadir dalam acara bedah buku karangannya yang berjudul *Allah, Liberty and Love* pada Mei 2012 di Komunitas Salihara, Jakarta. Acara itu sendiri diselenggarakan atas kerjasama beberapa organisasi, seperti YLBHI, LBH Jakarta, ELSAM, KontraS, Perkumpulan Ekitas Indonesia, JIL dan Our Voice. Saat acara berlangsung, ormas ekstrim Front Pembela Islam (FPI) menuding acara itu mengkampanyekan isu gay dan lesbian. Pemikiran Manji dinilai acapkali menuai kontroversi tentang Islam. FPI yang dikawal satuan anggota Polres Jakarta Selatan membubarkan paksa acara bedah buku itu. Polisi pun melakukan evakuasi terhadap Irshad Manji.

Tak hanya sampai di situ, diskusi buku serupa yang diadakan di Lembaga Kajian Islam (LKIS) Yogyakarta pada 9 Mei 2012 juga mengalami nasib yang sama. Sekitar 20 orang FPI memaksa masuk kemudian bertindak anarkis. Dengan membabibuta, mereka memecahkan kaca kantor LKIS, membanting piring, gelas, pot bunga, dan menyobek buku milik perpustakaan LKIS.

Dampak penyerangan tersebut, Universitas Gajah Mada Jogjakarta yang ingin mengadakan diskusi yang sama memilih untuk membatalkan diskusi tersebut. Tak urung, hal tersebut menuai kontroversi di kalangan akademisi. Hal tersebut terjadi karena kampus yang seharusnya menjadi pusat telaah dan desiminasi gagasan secara ilmiah takut oleh tekanan dan demonstrasi sekelompok orang. Beberapa kalangan menyayangkan dibatalkannya diskusi di UGM ini, misalnya dari Gerakan Pemuda (GP) Anshor, yang disampaikan Nusron Wahid yang menyesalkan pembatalan diskusi tersebut. Senada dengan Nusron Wahid, Bonar Tigor Naipospos dari Setara Institute juga menyesalkan pembatalan diskusi itu, karena menurutnya, penolakan Irshad Manji, selain dilakukan atas dasar prasangka bahwa yang bersangkutan menyebarkan pemikiran yang kontroversial, juga cermin



bahwa toleransi di tengah masyarakat kita tidak ada. Bahkan, toleransi atas perbedaan pemikiran sekalipun.

Beberapa alasan dikemukakan oleh ormas keagamaan dalam menolak Irshad Manji, karena ia dituduh sebagai aktivis feminis muslim yang berjuang keras mempromosikan HAM, kesetaraan dan keadilan gender, dan hak-hak kelompok minoritas. Ia juga dituduh mempromosikan kebebasan sex. Padahal dalam beberapa wawancara, Irshad Manji sendiri mengaku bahwa tujuannya ke Indonesia sama sekali tidak bertujuan untuk mempromosikan apa yang dituduhkan pada dirinya.

## Siapa Irshad Manji?

Sebenarnya siapa Irshad Manji dan mengapa menjadi kontroversial? Lebih banyak tentang Irshad Manji dapat dilihat dalam situs resminya di [www.irshadmanji.com](http://www.irshadmanji.com). Irshad Manji dilahirkan di Uganda pada tahun 1968. Ayahnya adalah seorang India Gujarat, dan ibunya berasal dari Mesir. Keluarganya pindah ke Kanada ketika ia berusia empat tahun, akibat pengusiran Idi Amin, diktator yang berkuasa saat itu. Ia dan keluarganya menetap di dekat Vancouver pada tahun 1972.

Irshad tumbuh besar dengan mengenyam di dua tipe sekolah, yakni sekolah umum dan sekolah Islam atau yang lebih dikenal dengan nama madrasah. Sekolah umum ia ikuti dari hari Senin hingga Jumat, selebihnya dia belajar di madrasah. Pada usia 14 tahun, Irshad dikeluarkan dari madrasah karena dinilai terlalu banyak mengajukan pertanyaan.

Irshad Manji tak putus harapan, ia terus mendalami Islam dengan cara pandang sendiri. Ia berpendapat bahwa pendidikan yang ia dapatkan dari bangku madrasah bukanlah pendidikan, namun indoktrinasi.

Manji menjelaskan bahwa, "Pendidikan membebaskan untuk berpikir, sedangkan indoktrinasi menghanskannya."

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Universitas, ia kemudian bekerja sebagai asisten legislatif bidang perempuan di Parlemen Kanada. Selanjutnya, ia menjadi sekretaris pers dan mengurus isu-isu perempuan di Kementerian Ontario kemudian menulis pidato untuk pemimpin Partai Demokratik Baru.

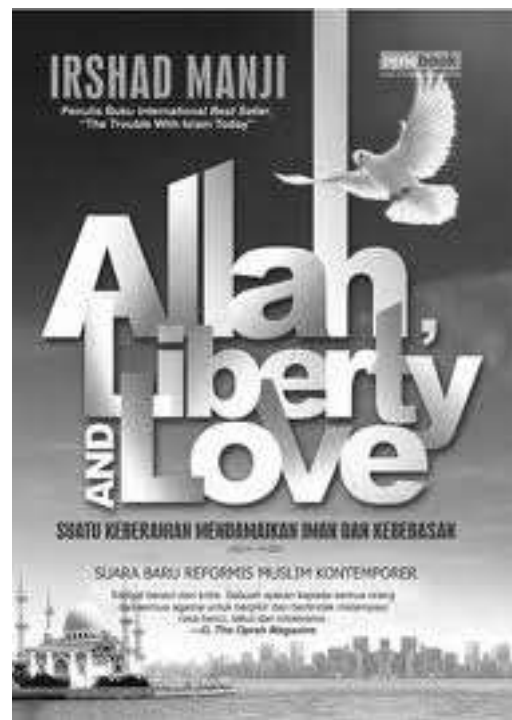
Pada usia 24 tahun, Manji memasuki dunia jurnalisisme profesional sebagai penulis editorial nasional di Surat kabar Ottawa Citizen. Posisinya tersebut membuatnya dinilai sebagai anggota termuda dewan editorial untuk koran harian di Kanada.

Setelah itu, Manji memulai karier di stasiun televisi. Pada pertengahan tahun 1990, ia turut andil pada acara *Friendly Fire*, segmen debat mingguan yang berisi tentang pandangan liberal melawan orang-orang konservatif. Manji kemudian memproduksi acara bertajuk *In the Public Interest* di Vision TV, sebuah acara yang mempertunjukkan akuntabilitas para politisi dan CEO.

Mulai tahun 1998 hingga 2001, Manji menjadi tuan rumah acara di Queer Television (QT), program pertama di dunia yang disiarkan secara komersial untuk mengeksplorasi kehidupan gay dan lesbian. Acara ini kemudian banyak disiarkan secara *online* atau *streaming* meskipun terdapat sensor oleh pemerintah. Pada akhirnya, QT memenangi penghargaan Gemini, *Canada's top broadcasting award*.

Pada tahun 2001, Manji meluncurkan program TV baru dan menulis buku yang membawanya menjadi perhatian publik internasional. Dia membawakan acara TV *Ontario's Big Ideas*, yang acaranya menuangkan ide-ide pada bidang ekonomi sampai spiritualitas. Selama kurun waktu tersebut, Manji bekerjasama dengan Universitas Toronto Hart House sebagai jurnalis lepas. Di sana, ia menulis buku berjudul *The Trouble with Islam Today*. Setelah merilis buku itu tahun 2004, Manji mulai sering mengadakan tur dan terlibat banyak dialog di berbagai negara.

Pada tahun 2005, Manji bergabung di Yale University dan menjadi anggota senior Yayasan *European Foundation for Democracy*. Ia sempat pula memberikan kuliah umum tentang Islam di kawasan Atlantik. Pada masa yang sama, ia juga bekerja di PBS untuk menghasilkan karya *Emmy-nominated documentary, Faith Without Fear*, sebuah film dokumenter yang ditayangkan pada tahun 2007. Pemutaran film tersebut diadakan di Pascasarjana Pelayanan Publik, New York University School. Robert F. Wagner, dekan fakultas tersebut kemudian merekrut Manji untuk mengajarkan kuliah keberanian moral. Saat kepindahannya dari Toronto ke Manhattan, Manji mendirikan *Moral Cour-*



*age Project*, dan kemudian menulis buku berjudul *Allah, Liberty and Love*.

Tahun 2005, pada Hari Perempuan Internasional, *The Jakarta Post* juga mengakui Irshad Manji sebagai satu dari tiga muslimah yang mampu menciptakan perubahan positif dalam Islam.

### Mengapa menjadi kontroversi?

Pemikiran-pemikiran Irshad Manji dituangkan dalam beberapa buku, seperti *The Trouble with Islam* yang kemudian dalam edisi Indonesia diterjemahkan dalam judul *Beriman Tanpa Rasa Takut: Tantangan Umat Islam Saat Ini (Faith Without Fear: A Challenge to Islam Today)*. *Beriman Tanpa Rasa Takut* adalah salah satu karyanya yang menjadi bestseller di banyak tempat dan telah diterbitkan di beberapa negara, antara lain Pakistan, Turki, Irak dan India. Dalam terjemahan-terjemahan sebelumnya atas buku ini--Arab, Urdu, dan Persia--judul aslinya adalah *The Trouble with Islam*. Judul yang provokatif tersebut dipilih karena, menurutnya, umat Islam mempunyai masalah besar di depan mata. Maka itu sebagai muslimah ia harus menyatakan bahwa kebungkaman bukanlah pilihan. Pesan sederhana yang hendak ia sampaikan ialah bahwa hanya kaum muslim yang bisa memastikan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan, dengan mengatasnamakan Allah, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Sementara *Allah, Liberty and Love* adalah buku Irshad Manji yang dirilis pada Juni 2011 di Amerika Serikat, Kanada dan negara lainnya, termasuk Indonesia. Di situsnya dijelaskan bahwa, "Allah, Liberty and Love" menjelaskan kepada kita semua bagaimana mendamaikan iman dan kebebasan dalam dunia yang



mendidih dengan dogma represif. Pengajaran pokok Manji ialah keberanian moral, keinginan untuk berbicara ketika orang lain ingin membungkamnya. Buku tersebut disebut sebagai buku panduan utama menjadi warga dunia berani.

Dalam kata pengantarnya, Manji menuliskan bahwa Allah adalah sebutan untuk Tuhan dalam bahasa Arab--Tuhan kebebasan dan cinta yang berlaku universal. Ia sadar, pemahaman tersebut tidak sama persis dengan persepsi kebanyakan orang tentang Allah. Baginya, Tuhan telah begitu mencintainya dengan memberi banyak pilihan dan kebebasan untuk menentukannya. Yang gilirannya, mencintai sesama makhluk Tuhan berarti meyakini akan kemampuan mereka untuk menentukan pilihan sendiri. Dengan demikian, cinta menuntutnya melakukan dua hal secara bersamaan: memperjuangkan kebebasan, bukan sekadar untuk dirinya sendiri, dan melawan penjahat-kekuasaan yang mencuri pilihan-pilihan itu dari kita sebagai manusia merdeka. Di masa-masa sekarang, hubungan antara kebebasan dan cinta harus dieksplorasi secara jernih.

Menurutnya, cara terbaik untuk menghargai kecerdasan manusia adalah dengan memiliki keyakinan akan potensinya untuk menjadi agen perubahan dalam kehidupan ini, daripada duduk melamun dengan harapan fatalistik tentang kehidupan setelah kematian. Melalui keyakinannya akan kapasitas kreatif tiap individu, ia berharap dapat berbicara dengan penuh hormat kepada mereka yang beragama maupun yang tak beragama

Sebagai jurnalis, artikelnya telah muncul di berbagai publikasi. Dia telah didaulat menjadi pembicara dari *Amnesty International* untuk kaum Muslim Demokrat di Denmark termasuk *Royal Canadian Mounted Police*. Dia telah muncul di jaringan televisi seluruh dunia, termasuk Al Jazeera, CBC, BBC, MSNBC, C-SPAN, CNN, PBS, Fox News Channel, CBS, dan HBO. Karena pemikiran-pemikirannya itu Irshad Manji dikenal sebagai kritikus tajam pemikiran Islam dan menjadi kontroversi, bahkan oleh harian *New York Times* ia dijuduli, "mimpi buruk Osama bin Laden".\*\*\*\*\* (JK)



# Pura Langgar: Tempat Inspiratif Bertoleransi

Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, berbagai suku bangsa, ras, agama, budaya, bahasa dan sebagainya tumbuh berkembang berdampingan. Meskipun majemuk, masyarakat Indonesia tetap dapat hidup rukun, aman, damai dan tentram.

Belakangan wacana keberagaman agama menjadi topik yang hangat diperbincangkan seiring dengan banyaknya konflik bernuansa agama yang muncul di daerah-daerah di nusantara kita, sehingga tampaknya tidak mudah menciptakan kerukunan antar umat dan di dalam umat beragama. Ini juga kerap kita temukan antar kelompok/golongan terjadi konflik yang mengatasnamakan golongan atau bahkan agama dan Tuhan. Mereka saling mencerca, menindas bahkan membunuh satu sama lain. Padahal dalam agama mana pun pastilah tidak diajarkan Tuhan masing-masing berbuat seperti itu. Barangkali kini toleransi menjadi barang langka yang harus dihidupkan kembali guna menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis, yang benar-benar berbudaya, tanpa menggunakan kekerasan dan bisa saling menghargai serta toleran antar sesamanya.

Untuk memupuk kembali rasa saling toleran antar sesama itu, mungkin pendekatan budaya menjadi pilihan yang tepat untuk merekatkan kembali jaringan keberagaman yang sudah terkoyak akibat kefanatikan dan ekstrimisme segelintir orang atau kelompok kecil, hingga merusak rasa persaudaraan antar sesama makhluk Tuhan dan warga bangsa serta warga masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan pem-



buatan film dokumenter yang berisi pesan moral yang kaya akan nilai-nilai toleransi yang inspiratif.

## Pura tanpa daging babi

Film dokumenter ini dibuat oleh sutradara muda asal Bali, Dwitra J. Ariana. Film ini pernah mendapatkan penghargaan sebagai pemenang harapan pada Festival Film Dokumenter Bali tahun 2012. Film ini sendiri menceritakan tentang nilai-nilai kerukunan beragama yang disimbolkan pada bentuk bangunan Pura Langgar, sebagai lambang kerukunan umat muslim dengan pemeluk agama Hindu.

Di awal film diceritakan bahwa di desa Bunutin, Bangli, Bali terdapat sebuah pura yang bernama Pura Dalem Jawa atau lebih dikenal dengan nama Pura Langgar. Langgar sendiri adalah tempat ibadah umat muslim, seperti mushola, atau masjid dalam ukuran kecil, sementara Pura merupakan tempat beribadahnya umat Hindu. Menjadi menarik karena bangunan Pura ini bentuknya menyerupai Langgar. Uniknyanya Pura ini memiliki bangunan segiempat yang memiliki empat pintu, dua undakan serta atapnya bertingkat dua, yang konon katanya melambangkan syariat dan tarikat Islam.

Hal menarik lainnya terjadi dalam sisi ritualnya. Pada umumnya masyarakat Hindu Bali dalam setiap

<b>Judul</b>	: Pura Tanpa Daging Babi
<b>Sutradara</b>	: Dwitra J. Ariana
<b>Produser</b>	: Dwitra J. Ariana
<b>Periset</b>	: Andika Ananda, Gede Suardika, Komang Windu, Dwitra J. Ariana
<b>Produksi</b>	: Disbudpar Kab. Bangli, Bali dan Sanggar Siap Selem Jeruk Mancingan
<b>Narasumber</b>	: AA Biyang Mangku; AA Oka Widyarshana; Nasrudin; Gede Sutarya
<b>Durasi</b>	: 29 menit



pemujaannya selalu menggunakan sesajen dengan daging babi, namun di Pura Langgar, hal itu tidak ada melainkan menggunakan ayam sebagai gantinya. Di Pura ini mempunyai ritual pemotongan hewan, seperti pada perayaan Idul Adha yang dilakukan oleh umat muslim. Bedanya, yang dilakukan di Pura Langgar ini dilaksanakan sebelum hari raya Nyepi.

Dalam film ini digambarkan bagaimana sikap toleransi terhadap perbedaan ditunjukkan oleh para jemaat Pura Langgar, yang dengan besar hati mengizinkan para pengunjung Pura yang beragama Islam untuk berkunjung bahkan melakukan Shalat di dalam Pura tersebut. Tempat wudhu pun sengaja dibangun bagi para pengunjung yang beragama Islam. Sikap terbuka ini pun disambut baik oleh para pengunjung yang muslim. Mereka pun tanpa sungkan menggelar sajadah dan melakukan Shalat di dalam Pura Langgar. Sebagian dari mereka mengaku bahwa awalnya mereka datang ke Pura ini karena tertarik dan penasaran dengan keunikannya. Akhirnya mereka pun merasa memiliki keterikatan dengan sejarah berdirinya Pura Langgar ini.

Kisah berdirinya Pura Langgar konon masih ada kaitannya dengan Kerajaan Blambangan tempo dulu. Bahkan, leluhur kalangan Puri Agung Bunutin syahdan berasal dari trah Raja Blambangan, Jawa Timur. Menurut cerita, Raja Bunutin, Ida I Dewa Mas Blambangan masih merupakan keturunan Raja Blambangan. Konon diceritakan Raja Mas Blambangan menderita sakit parah yang tak kunjung sembuh. Melihat hal tersebut, adik sang Raja kemudian berinisiatif melakukan Yoga Samedhi. Akhirnya setelah melakukan ritual khusus, dia kerasukan Ida Bathara dan mengucapkan sebuah permintaan bahwa dia minta dibuatkan Pelinggih Langgar untuk tempat sembahyang. Jika

permintaannya tidak dituruti, maka keturunannya secara turun-temurun akan menderita sakit yang berat namun tidak mengakibatkan kematian. Dan jika ada yang tidak setuju atau menolak permintaannya, maka akan mendapat musibah dan penderitaan lahir batin. Kemudian setelah keluarga berembuk, ternyata ada anggota keluarga kerajaan yang tidak setuju untuk membangun langgar. Mereka menolak serta siap menerima segala risiko yang akan menyimpannya. Ketiganya menganggap permintaan membuat langgar dalam areal Pura tidak sesuai dengan ajaran Hindu. Namun, Raja Bunutin dan adiknya, Mas Bunutin, sanggup mewujudkan pembangunan langgar tadi. Kemudian setelah selesai pembangunan Langgar, bangunan langsung diupacarai, dan tidak lama berselang, kondisi kesehatan Mas Blambangan mulai berangsur pulih. Itulah awal cerita mengapa Pura Langgar ini berdiri.

Dari film itu banyak pelajaran yang bisa kita petik. Salah satunya bahwa toleransi antara agama Hindu dan Islam telah ada sejak dulu kala. Terbukti dengan tokoh-tokoh pendahulunya yang mampu membangun komunikasi hingga mewujudkan dalam bentuk bangunan Pura Langgar. Selain itu, meskipun ritual shalat di dalam Pura banyak menimbulkan pro kontra, namun hal yang paling penting dipelajari adalah keberadaan Pura ini telah menjadi tempat yang memberi pencerahan akan toleransi beragama yang harus menginspirasi siapapun.\*\*\*\*\* (NR)

# “Ngesuhi Deso Sak Kukuban”: Merekatkan Persaudaraan dan Kemanusiaan

**N**gesuhi Deso Sak Kukuban merupakan ungkapan yang mengandung arti merekatkan sekaligus mendinamisir keseluruhan lapis-lapis potensi manusia, lingkungan dan sejarah, baik yang tampak maupun tidak, dalam suatu wilayah sosial. Ungkapan ini juga merupakan kata bijak yang ada dalam prinsip kepemimpinan masyarakat tradisional Jawa walaupun dalam praktiknya cenderung mengalami mistifikasi daripada realisasi. Dalam buku ini, ungkapan tersebut diyakini sebagai salah satu sumbangan lokal untuk model kritik terhadap persoalan pluralisme yang ada dalam masyarakat kita.

Buku ini sendiri merupakan kumpulan hasil penelitian yang dilakukan mula tahun 1999-2000 oleh tim peneliti LKiS bekerjasama dengan The Institute for the Study of Economic Culture (ISEC), Universitas Boston, serta The Ford Foundation. Penelitian yang dilakukan dengan menyertakan informan sebanyak 150 orang dari Yogyakarta ini berusaha menangkap wacana dan praktik pluralisme yang dipahami dan diyakini oleh para informan itu sendiri, lingkungan terdekat mereka, sampai di tingkatan nasional.

Buku seri publikasi penelitian ini terklasifikasi dalam 3 Bagian. Bagian Pertama, mengkaji praktik pluralisme di beberapa wilayah di Yogyakarta melalui peristiwa-peristiwa sosial, seperti Festival Kotagede tahun 2000, Haul di Mlangi, dan Doa Bersama di Sorowajan. Bagian Kedua, mengeksplorasi dinamika pembagian (stereotyping) agama-agama menjadi abangan dan santri dalam merespons tema-tema dan gerakan-gerakan sosial baru; dalam hal ini disajikan wacana gender. Bagian Ketiga, memfokuskan diri bagaimana pluralitas dikelola oleh masyarakat dalam suatu wilayah atau kota, terutama dalam menghadapi konflik-konflik yang terjadi dan resistensinya.

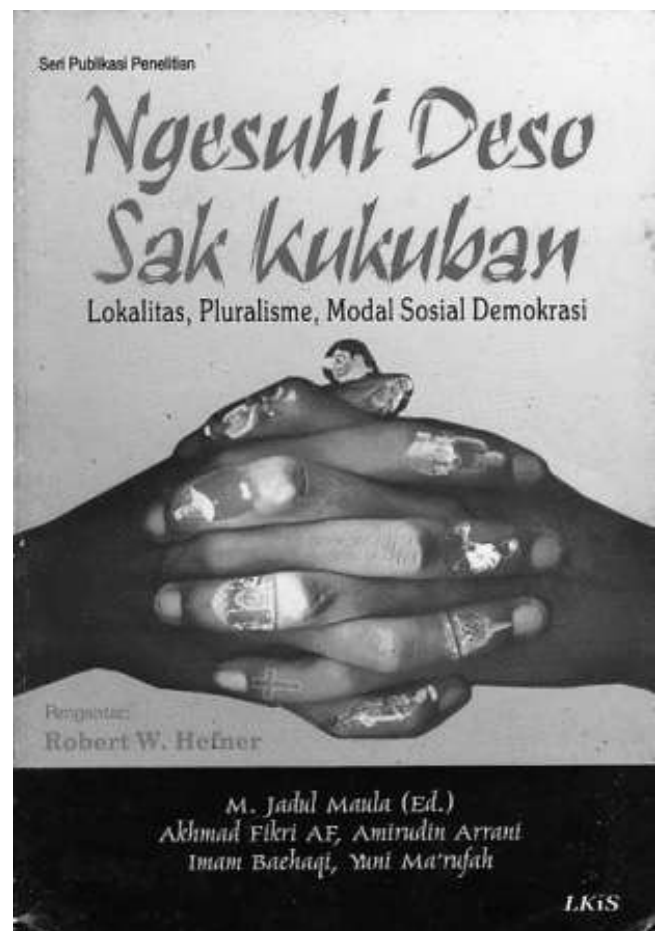
## Menyorot pluralisme dalam peristiwa sosial

Festival Kotagede tahun 2000 merupakan peristiwa yang menampilkan realitas seni-budaya yang ada di Kotagede. Festival tahunan ini dijadikan media pengembangan ekonomi masyarakat melalui pariwisata. Oleh karenanya, kemeriahan hajatan besar setiap tahun ini terus meningkat.

Peneliti menggambarkan situasi dalam peristiwa Festival Kotagede tahun 2000 ibarat “a moving equilibrium” atau “keadaan yang memuat tarik-menarik hubungan-hubungan berbagai kekuatan terhadap

berbagai tendensi”. Pada penyelenggaraannya ditemukan berbagai masalah sejak persiapan sampai pasca pelaksanaan, yang memicu terjadinya ketegangan dan gesekan secara ideologis. Sebagai contoh, adanya pertunjukan Jailangkung yang dianggap oleh Muhammadiyah bisa memberikan dampak buruk terhadap akidah masyarakat, atau penampilan seni yang bertema “Buruh Gugat” yang dianggap sebagai representasi paham komunis. Padahal, penampilan tersebut juga mewakili kenyataan masyarakat di Kotagede, yakni gaji dan nasib buruh yang sangat tidak manusiawi.

Hal itu menunjukkan bahwa penyelenggaraan festival, di satu sisi, memberikan ruang budaya kepada wacana Kejawaen dan kepentingan-kepentingan rakyat kecil, terutama kaum buruh untuk tampil, namun di sisi lain, memancing reaksi kelompok dominan dan memaksa perumusan ulang terhadap penyelenggaraan festival tersebut. Selanjutnya, peneliti mencermati bahwa terjadi pergeseran pola ketegangan dalam perkembangan penyelenggaraan festival. Tahun-ta-





<b>Judul</b>	<b>: Ngesuhi Deso Sak Kukuban: Lokalitas, Pluralisme, Modal Sosial Demokrasi</b>
<b>Editor</b>	<b>: M. Jadul Maula</b>
<b>Penerbit</b>	<b>: LKiS Yogyakarta</b>
<b>ISBN</b>	<b>: 979-9492-00-9</b>
<b>Tahun Terbit</b>	<b>: 2002</b>
<b>Jumlah Halaman</b>	<b>: xxii+194 hal.</b>

hun sebelumnya konflik terjadi antara orang-orang Muhammadiyah dan kaum Kejawen, akan tetapi di tahun 2000, justru antara orang-orang tua dengan anak-anak muda dalam lingkungan Muhammadiyah.

Di Mlangi, peristiwa haul adalah tradisi keagamaan yang umumnya dilaksanakan untuk mengenang peran seorang tokoh (agama) guna mengambil manfaat derita tentang ketokohnya di masa lalu untuk mengawal cita-cita kehidupan di masa datang. Dan bagi masyarakat Dusun Mlangi, haul merupakan usaha untuk memperoleh kemakmuran di bidang ekonomi. Mbah Nur Iman adalah sosok yang oleh masyarakat Mlangi dijadikan tokoh pertautan asal-usul Dusun Mlangi. Oleh karenanya, Haul Mbah Nur Iman menjadi tradisi yang penting bagi masyarakat Mlangi, terutama berkait dengan keyakinan untuk perbaikan ekonomi di samping pembuktian cinta, bakti, dan rasa hormat kepada sosok tersebut.

Dalam perjalanannya dari tahun ke tahun, timbul berbagai konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik-konflik yang terjadi di masyarakat Mlangi sesungguhnya berakar pada masalah kepentingan politik. Posisi Mbah Nur Iman dijadikan sebagai obyek imajiner untuk membangun dasar-dasar ekonomi dan reposisi peranan sosial keagamaan yang kala itu makin redup.

Lain halnya di di Sorowojan. Penyelenggaraan doa bersama setiap tahun oleh masyarakat Sorowajan merupakan fenomena menarik di tengah konteks sosial politik dewasa ini, yang kerap terjadi konflik sosial berbasis agama. Pada mulanya, doa bersama atau "kendurenan" bermakna syukuran atas panen yang diperoleh dan permohonan ampun, serta keselamatan hidup bagi masyarakat kepada Tuhan melalui arwah leluhur. Kini berkembang menjadi kepentingan institusi agama, yang semula menjadi dialog dan integrasi antar anggota masyarakat, kini menjadi dialog dan integrasi antar agama.

#### **Wacana gender di kalangan santri dan abangan**

Wacana gender memang selalu menarik untuk

diperbincangan. Dan respon tiap individu terhadap isu ini akan sangat beragam. Dalam buku ini, peneliti melakukan kajian yang bertujuan untuk mengetahui respon kalangan santri di Yogyakarta terhadap isu gender. Santri yang dimaksud dalam makna yang luas, yakni mereka yang secara kultural terikat dengan tradisi-tradisi keislaman dengan beragam latar belakang yakni mahasiswa, dosen, nyai, praktisi politik, aktivis organisasi sosial, dan lainnya. Dari penelitian tersebut, ditemukan respon yang beragam; ada gugatan, kesadaran, dan ada pula keterpaksaan dalam merespon isu. Mulai dari perbedaan pendapat dalam memaknai kodrat, hingga pemaknaan feminisme.

Beberapa santri yang secara umum menunjukkan ketidaksepakatan terhadap isu gender menekankan bahwa pembedaan perempuan dan laki-laki dianggap suatu keharusan, karena sudah termaktub dalam kitab suci. Secara kodrat, kewajiban perempuan adalah mengurus rumah tangga. Dalam bidang pendidikan, perempuan dan laki-laki harus dibedakan. Terutama dalam pendidikan agama, di mana laki-laki harus ditamatkan karena dalam kehidupan berumah tangga, laki-laki yang akan menuntun dan bertanggungjawab terhadap agama isterinya. Oleh karenanya, gagasan feminisme dianggap terlalu mengada-ada. Santri yang berpendapat bahwa kesetaraan gender adalah penting mengungkapkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam mengakses pendidikan. Dan terhadap feminisme, sesungguhnya Islam sangat mendukung karena tujuannya untuk memuliakan perempuan, dan tiap umat wajib membebaskan perempuan dari segala bentuk penindasan dan ketidakadilan.

Dalam tarik-ulur wacana gender di kalangan abangan dan santri, sangat menarik untuk mencermati reaksinya. Untuk memetakan reaksi tersebut, peneliti membagi masing-masing menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, abangan penganut spritual Jawa yang menolak kritikan para penggagas gender. Dalam responnya, kompok ini mengedepankan ideologi "familialisme" yang menekankan posisi terbaik perempuan adalah sebagai ibu dan isteri yang bertanggung

jawab terhadap urusan rumah tangga. Bagi kelompok ini, tempat yang paling baik bagi perempuan adalah di dunia yang halus, dan jauh dari kekerasan sesuai dengan sosok yang melekat dalam diri perempuan, yakni lemah lembut dan halus. Selain itu, kelompok ini menegaskan bahwa konsep yang paling utama dalam hidup adalah rasa. Dalam tiap lini kehidupan, pandangan kelompok ini menjadi netral gender. Kelompok kedua adalah abangan sekuler, yang umumnya lebih realistis, dan rasional dalam melihat suatu persoalan dan penyelesaiannya.

Selain itu, peneliti pun mengelompokkan kalangan santri ke dalam dua kelompok: kelompok tradisional dan modernis. Kelompok tradisional cenderung menerima "wacana gender" dan dianggap sebagai angin segar bagi perjuangan dan perlawanan mereka terhadap kondisi subordinasi dan diskriminasi, yang dialami oleh perempuan melalui konstruk ajaran-ajaran. Respon kelompok modernis lebih bersifat institutional, yakni mengembangkan penguatan perempuan dengan mendirikan lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi perempuan, terutama pendidikan dan kekerasan terhadap perempuan. Dalam konteks pemikiran, wacana gender cenderung apologetik.

Dengan mencermati respon yang beragam tersebut, menegaskan pentingnya mempertimbangkan tradisi dan kultur lokal sebagai pijakan untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah kesetaraan dan keadilan. Sebab wacana gender masih akan terus bergulir, dan kontroversi kemungkinan akan selalu menyertainya seiring dengan perkembangan politik dan perubahan-perubahannya.

### Pluralitas dalam kewilayahan

Dusun Mlangi merupakan salah satu dusun dari delapan dusun yang terletak di kelurahan Nogotirto, Gamping, Sleman, D. I. Yogyakarta. Dusun Mlangi adalah satu bentuk komunitas orang Jawa. Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya mengungkapkan pluralitas masyarakat Mlangi, tetapi juga sikap masyarakat terhadap pluralitas tersebut.

Mlangi terpecah menjadi dua, yakni Mlangi Jero (memiliki garis keturunan Mbah Nur Iman) dan Mlangi Jobo (yang tak termasuk garis keturunan). Mbah Nur Iman, tokoh sejarah cikal bakal dusun Mlangi, juga dianggap sebagai awal mengapa terjadi pembagian tersebut. Implikasi adanya dua kubu tersebut tak hanya terjadi dalam lingkup geografis, namun menjalar ke berbagai hal, yakni pergaulan sosial, pembagian kerja, dan status sosial. Oleh karenanya, potensi konflik juga sangat terasa, karena dalam berbagai implikasi itu

Mlangi Jero menjadi lebih superior, dan Mlangi Jobo merasa terpinggirkan. Akan tetapi, persoalan tersebut makin memudar seiring dengan meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Mlangi.

Dalam ranah konflik, peneliti menemukan beberapa konflik yang pernah terjadi di Mlangi, seperti konflik doktrin dan kepentingan antara NU dan Muhammadiyah, konflik dalam partai politik yang juga berbasiskan perselisihan NU-Muhammadiyah, serta konflik dalam bidang kesenian.

Melihat adanya berbagai konflik itu, peneliti menyimpulkan bahwa sesungguhnya masyarakat Mlangi menyimpan pluralitas yang kompleks, yang juga menyimpan potensi konflik yang sangat besar. Berbanding terbalik dengan pengakuan masyarakat Mlangi yang mengatakan mereka tidak plural. Pluralitas itu sulit diterima dan dihadapi. Oleh karenanya, menurut peneliti, media integrasi yang selama ini dilakukan tak menjadi katalisasi konflik. Kunci pemecahannya terletak pada upaya bersama warga negara dan pemerintah untuk bekerja bersama sebagai preseden terbaik pluralisme dan toleransi dalam masyarakat, ketimbang menentangnya.\*\*\*\*\* (IK)



## Kutub Yang Menangis

Oleh: Wa Ode Lucia Rahmadisinta

Binasa Kampung Lestariku

Oleh: Iswan Kaputra

Alur awan begitu biru pagi itu  
Selendang mega melambai lembut mengiringi matahari  
pulang  
Ketika sampai di tanah basah  
Bau alam sebuah lembah  
Saat pertama tengok dunia, tepatnya surga, saat ku kecil

Kini...  
Kupu-kupu dan burung-burung tak lagi seperti kupu-  
kupu dan burung-burung...?  
Saat pepohonan kering meranggas...!  
Jatuh terhempas, keras merana...!  
Ikan-ikan dan itik-itik tak lagi seperti ikan-ikan dan itik-  
itik  
Titik embun tak lagi seperti Engkau mengkaruniakannya  
saat lembut pagi membelai ujung daun...?  
Saat air keruh dipenuhi nila...!

Kampungku yang dulu menawan seperti negeri di awan  
Hijau seperti tak pernah kemarau  
Kini kelam...!  
Merah mengganas...!  
Panas...!  
Mendidih...!

Ku rindu...  
Kupu-kupu...  
Burung-burung...  
Belai embun pada daun, bunga-bunga liar setinggi lu-  
tut...  
Dan bening air pembasuh noda...

Sungguh ku ingin pulang...!  
Pulang pada masa surga ada di sana...  
Pulang pada hijau...  
Pulang pada awan yang membasuh negri setiap pagi...

Namun...  
Kupu-kupu dan burung-burung tak lagi seperti kupu-  
kupu dan burung-burung...!!!

Rinduku pada hutan  
Menginjak rumputnya  
Embunnya

## Dewi Misteri

Oleh: Iswan Kaputra

Wajah siapa....  
Di cakrawala....  
Air matanya....  
Menyimpan duka....

Wajah itu ku kenal...  
Namu aku harus menyisir keras bilik-bilik memoriku.  
Wajah siapa gerangan.  
Jauh... Ku kembara waktu...  
Puas... Ku kembara angin...  
Lelah... Ku tapaki bumi....

Tak ku temukan jua... Wajah siapa di cakrawala...!!!  
Padahal kemaren datang, masih seperti biasanya...  
Membelai sela kerusung setelah bersuci dengan air ben-  
ing... ~ ~ ~  
Berdecak di sela-sela ceritanya...  
Memeluk lembut hatiku di saat lara ~ ~ ~

Wajah itu selalu datang,  
Pada semua saat (detik, menit, jam, hari, minggu, bulan,  
tahun, windu, dekade, maupun abad)...!!!  
Pada lambai nyenyak namun gelisah tafakurku.  
Wajah itu selalu senyum dan menyapaku dalam mimpi,  
saat aku (tudur, terjaga, beraktifitas, mengantuk seten-  
gah sadar bahkan pingsan)...!!!  
Kapan-pun... Dimana-pun...!!!

Hingga lolong serigala tak putus sepanjang malam...  
Hanya ingin mendapat jawaban, wajah siapa di cakrawa-  
la.

Sekarang....  
Wajah itu di pelupuk mataku...  
14 tahun menyisir keras bilik memori... Tak ku temukan...  
14 tahun bermimpi pada semua saat, tidur dan terjaga...  
Tak kutemukan...  
Kini... Sang Dewi Misteri menjelang di depan mata.

Namu ia hanya menyapa... biasa saja...  
Ternyata Awak cinta setengah mati...!!! Dia tak apa-apa...  
~ ~ ~  
14 tahun... hatiku mencarimu... berkelana di gelapnya  
cakrawala...!!!

\*) *Iswan Kaputra* saat ini aktif di BITRA Indonesia, Medan

## Pluralisme

Secara etimologis, pluralisme terdiri atas kata plural yang berarti jamak atau lebih dari satu; dan isme yang berarti aliran atau kepercayaan. Jadi, pengertian pluralisme secara sederhana yakni banyak kepercayaan. Pluralisme adalah keadaan masyarakat yang majemuk, baik bersangkutan dengan sistem sosial ataupun sistem politiknya. Pluralisme adalah paham yang mengakui bahwa terdapat berbagai entitas yang tidak tergantung yang satu dari yang lain. Masing-masing paham atau entitas berdiri sendiri tidak terikat satu sama lain, sehingga tidak perlu ada substansi pengganti yang mensubstitusi berbagai entitas tersebut. Salah satu contoh, di Indonesia terdapat ratusan suku bangsa. Menurut pluralism, tiap suku bangsa dibiarkan berdiri sendiri lepas yang satu dari yang lain; tidak perlu ada substansi lain, yang namanya bangsa, yang mereduksi eksistensi suku-suku bangsa tersebut.

## Pluralitas

Pluralitas adalah sifat atau kualitas yang menggambarkan keanekaragaman; suatu pengakuan bahwa alam semesta tercipta dalam keaneka-ragaman. Sebagai contoh, bangsa Indonesia mengakui bahwa negara-bangsa Indonesia bersifat pluralistik, beranekaragam ditinjau dari suku-bangsanya, adat budayanya, bahasa ibunya, agama yang dipeluknya, dan sebagainya. Hal ini merupakan kenyataan atau keniscayaan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Keanekaragaman ini harus didudukkan secara proporsional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, harus dinilai sebagai asset bangsa, bukan sebagai faktor penghalang kemajuan.

## Multikulturalisme

Secara etimologis, multikulturalisme terdiri dari kata multi yang berarti plural atau jamak atau lebih dari satu, cultural berarti kebudayaan, dan isme yang berarti aliran atau kepercayaan. Jadi, multikulturalisme secara sederhana adalah paham atau aliran tentang budaya yang plural. Dalam pengertian yang lebih mendalam, istilah multikulturalisme bukan sekadar pengakuan terhadap budaya (kultur) yang beragam melainkan pengakuan yang memiliki implikasi-implikasi politis, sosial, ekonomi dan lainnya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, multikulturalisme adalah gejala seseorang atau suatu masyarakat yang ditandai oleh kebiasaan menggu-

nakan lebih dari satu kebudayaan.

## Liberalisme

Liberalisme atau Liberal adalah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan atas pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya oleh pemerintah dan agama. Dalam masyarakat moderen, liberalisme akan dapat tumbuh dalam sistem demokrasi, hal ini karena keduanya sama-sama mendasarkan kebebasan mayoritas. Liberalisme merupakan paham yang mengutamakan kebebasan dan kemerdekaan individu. Istilah liberalisme berasal dari bahasa Latin, *libertas*, yang artinya kebebasan, sedangkan dalam bahasa Inggris, *liberty*, artinya kebebasan. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan individu untuk memiliki tempat tinggal, mengeluarkan pendapat, dan berkumpul.

## Primordialisme

Primordialisme adalah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat-istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada dalam lingkungan pertamanya. Primordialisme berasal dari bahasa Latin "*primus*" yang artinya pertama, dan *ordini* artinya tenunan atau ikatan. Ikatan seseorang pada kelompok yang pertama dengan segala nilai yang diperolehnya melalui sosialisasi akan berperan dalam membentuk sikap primordial. Di satu sisi, sikap primordial memiliki fungsi untuk melestarikan budaya kelompok. Di sisi lain, sikap ini dapat membuat individu atau kelompok memiliki sikap etnosentrisme, yakni sikap yang cenderung bersifat subyektif dalam memandang budaya orang lain. Mereka akan selalu memandang budaya orang lain dari kaca mata budayanya. Hal ini terjadi karena nilai-nilai yang tersosialisasi sejak kecil sudah menjadi nilai yang mendarah daging (*internalized value*) dan sangat susah untuk berubah dan cenderung dipertahankan bila nilai itu sangat menguntungkan baginya. Jadi, suatu primordialisme adalah kepercayaan yang mendarah daging. Maka tiap orang yang memiliki primordial, pasti dia akan sulit menerima paham lain selain paham yang telah mendarah daging dalam dirinya.\*\*\*\*\* (JK)

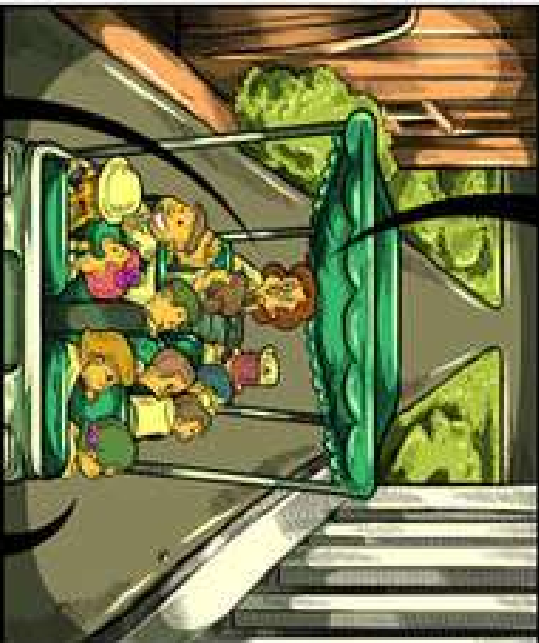


# Kostum

konik situasi untuk unum

## "Study Tour"

SESELU TEMA STUDY TOUR KITA,  
"KERUKUNAN UMAT BERGAMA". LIHAT ITU  
GEPEDA KATEDRAL DAN MASJID ISTILAL  
LETAKNYA SALING BERHADAPAN



BAHKAN ARSITEK MASJID  
ISTILAL ADALAH PENGA-  
NUT KRISTEN PROTESTAN

WOW ..

SATU DAN KEMUDIAN ...  
ANAK-ANAK, ISU GURU SEBELUMNYA  
SUDAH MINTA KALIAN UNTUK MEMBAWA  
PENUTUP MATA KAN ?



ITYA BU GURU,  
UDAH BAWA NIH.

NAH, SEKARANG  
SAATNYA KALIAN  
PAKAI YAH...

KARENA KITA SEDANG MELEWATI KAMPUNG  
CIKETING ASEM, BEKASI. ADA HAL YANG GAK  
NYAMBUNG DENGAN TEMA STUDY TOUR KITA.



TIDAK BOLEH  
MELAKUKAN KEBAK-  
TIAN DISINI !!

TAPI JANGAN  
ASAL MAEN  
TUSUK DONG !



HIDUP DI NEGERI RUPAL,  
MULTIRELIGI DAN KULTURAL.  
ISU BERTOLERANSI,  
TAK PERNAH JADI BASTI.

SELALU ADA ULAH KOTOR,  
DARI SANG PROVOKATOR.  
UNTUK MEROBOKKAN,  
KOKOHNYA PERSATUAN.

CERITA & GAMBAR : **HARYADHI**